

TEORI AKUNTANSI

Dita Andra Eny, M.Si
Devi Narulitasari, M.Si
Usnan, S.E.I., M.E.I



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

TEORI AKUNTANSI

Dita Andra Eny, M.Si
Devi Nurulitasari, M.Si
Usnan, S.E.I., M.E.I

TEORI AKUNTANSI

Dita Andra Eny, M.Si dkk. © Penulis 2018

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh buku ini
Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Teori Akuntansi/
— cet.1. — Yogyakarta: Gerbang Media, 2018
vii + 164 hal. 14,5 x 20,5 cm

ISBN: 978-602-6248-18-3

Cetakan 1, Agustus 2018
CV Gerbang Media Aksara
Alamat. jl sampangan No 58A, Rt 01 Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta Telp. (0274) 4353651
Bekerjasama dengan Fak Ekonomi dan Bisnis IAIN Surakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam semoga tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan sepanjang zaman.

Praktik akuntansi terus berkembang seiring dengan semakin beragamnya transaksi bisnis di berbagai sektor usaha. Dalam konteks ini, mahasiswa akuntansi harus memahami konsep-konsep yang mendasari praktik akuntansi tersebut sehingga mereka memiliki bekal ilmu ketika kelak ingin bekerja sebagai penyusun laporan keuangan perusahaan, auditor, akademisi, wirausaha, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa akuntansi untuk mempelajari mata kuliah teori akuntansi dengan baik karena teori akuntansi berisi pembahasan terkait konsep, prinsip, dan kaidah yang mendasari praktik akuntansi saat ini serta perkembangan standar akuntansi yang diterapkan. Buku ini disusun dengan harapan dapat memberikan

kemudahan bagi mahasiswa akuntansi untuk lebih memahami teori akuntansi.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa sesungguhnya masih banyak kekurangan dalam buku ini sehingga kami meminta kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Surakarta, Agustus 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : DEFINISI DAN PERUMUSAN TEORI AKUNTANSI	
A. Definisi Teori Akuntansi.....	1
B. Perumusan Teori Akuntansi.....	6
BAB II : PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONESIA	
A. Perkembangan Ilmu Akuntansi.....	9
B. Perkembangan Akuntansi berdasarkan Model Akuntansi yang digunakan.....	12
C. Perkembangan Akuntansi Berdasarkan Periodisasi....	15
BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI	
A. Perkembangan Ilmu Akuntansi.....	19
B. Perkembangan Akuntansi berdasarkan Model Akuntansi yang digunakan.....	21
C. Perkembangan Akuntansi Berdasarkan Periodisasi....	31
BAB IV : STANDAR AKUNTANSI	
A. Definisi Standar Akuntansi	36
B. Manfaat Standar Akuntansi.....	40
C. Perbedaan Standar Akuntansi, Prinsip Akuntansi dan Prinsip Akuntansi Berterima	41
Umum (PABU)	
D. Tahap Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia....	42

E. Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia.....	43
F. Pilar Standar Akuntansi di Indonesia.....	45

BAB V : KONSEP ASET

A. Definisi Aset	61
B. Penilaian Aset.....	66
C. Pengakuan Ase.....	76
D. Masalah-Masalah Khusus Aset.....	77

BAB VI : KONSEP KEWAJIBAN

A. Definisi Kewajiban.....	88
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Kewajiban.....	93
C. Penilaian Kewajiban.....	96
D. Pelunasan Kewajiban.....	97
E. Penyajian Kewajiban dalam Laporan Keuangan.....	98

BAB VII : KONSEP EKUITAS

A. Definisi Ekuitas.....	99
B. Komponen Ekuitas Pemegang Saham.....	99
C. Tujuan Penyajian Ekuitas dalam Laporan Keuangan.....	101
D. Penyajian Modal Pemegang Saham.....	102
E. Teori Ekuitas	102

BAB VIII : PENDAPATAN (*REVENUE*)

A. Masalah Teoritis Pendapatan.....	108
B. Definisi Pendapatan.....	109
C. Pendapatan (<i>Revenue</i>) dan Keuntungan (<i>Gains</i>)....	111
D. Pengakuan Pendapatan.....	114
E. Pengukuran Pendapatan.....	123
F. Penyajian Pendapatan.....	123
G. Pengungkapan Pendapatan.....	124

BAB XI : BIAYA (*EXPENSES*)

A. Pengertian Biaya.....	127
B. Biaya (<i>expenses</i>) dan Rugi (<i>loses</i>).....	128
C. Pengakuan Biaya.....	129
D. Pengukuran Biaya.....	133
E. Konsep Penandingan (<i>Matching</i>).....	133
F. Penyajian Biaya.....	140

BAB X : LABA (*INCOME*)

A. Pengertian Laba.....	141
B. Konsep Laba Ekonomi dan Laba Akuntansi.....	142

BAB XI : PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (*DISCLOSURE*)

A. Definisi Pengungkapan Laporan Keuangan.....	154
B. Jenis-Jenis Pengungkapan Laporan Keuangan.....	155
C. Metode Pengungkapan Laporan Keuangan.....	156

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

DEFINISI DAN PERUMUSAN TEORI AKUNTANSI

A. Definisi Teori Akuntansi

Pengertian teori akuntansi sangat bergantung pada pengertian akuntansi sebagai suatu bidang pengetahuan (suwardjono, 2008:9). Oleh karena itu, sebelum mendefinisikan teori akuntansi, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi dari “teori” dan “akuntansi”.

Terdapat banyak definisi baik teori maupun akuntansi. Adapun beberapa definisi tersebut diantaranya:

1. Definisi Teori

Braithwaite (1968) dalam (Ghazali dan Chariri, 2014:29) mendefinisikan teori sebagai “sistem deduktif dimana konsekuensi yang diobservasi secara logis mengikuti hubungan antara fakta yang diobservasi dengan seperangkat hipotesis dari sistem tersebut”. Sedangkan Popper (1968) dalam (Ghazali dan Chariri, 2014:29) mendefinisikan teori sebagai “area yang digunakan untuk menangkap apa yang kita namakan ‘dunia’ untuk merasionalkan, dan menjelaskannya”.

Harahap (2007:98) mendefinisikan teori sebagai “susunan konsep, definisi dan dalam menyajikan

pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena". Kenneth S. Most (1982) dalam (Harahap, 2007:98) mendefinisikan teori sebagai "suatu pernyataan sistematis mengenai peraturan atau prinsip yang mendasari atau memandu suatu set fenomena".

Teori juga diartikan sebagai seperangkat *konsep*, *definisi*, dan *proposisi* yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta, dimana teori akan berisi pernyataan-pernyataan asumsi dan hipotesis. Teori juga dapat diartikan sebagai suatu penalaran logis (*logical reasoning*) yang melandasi praktik (berupa tindakan, kebijakan atau peraturan) dalam kehidupan nyata (Suwardjono, 2008:19-21).

2. Definisi Akuntansi

Suwardjono (2008:10) mendefinisikan akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari *perekayaan* penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian

(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomik. Akuntansi juga didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasisuatu unit organisasi *dengan cara tertentu* untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Harahap (2007:4) mendefinisikan akuntansi atau *accounting* sebagai bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Harahap (2007:4-5) juga mendeskripsikan berdasarkan akronim dari kata Akuntansi yang terdiri dari 9 huruf dengan deskripsi bahwa akuntansi adalah menyangkut **angka**-angka yang akan dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan **keputusan**, angka tersebut menyangkut **uang** atau **nilai** moneter yang menggambarkan catatan dari **transaksi**

perusahaan. Angka tersebut dapat di-**analisis** lebih lanjut untuk menggali lebih banyak informasi yang dikandungnya dan memprediksi masa yang akan datang. Ia bersifat **netral** kepada semua pemakai laporan, memiliki unsur **seni** karena adanya berbagai alternatif yang dapat dipilih melalui pertimbangan subjektif serta merupakan **informasi** yang sangat diperlukan oleh para pemakai untuk pengambilan keputusan.

American Institute of Certified Public Accountant (1953) dalam (Ghazali dan Chariri, 2014:51) mendefinisikan akuntansi sebagai seni (*art*) mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya.

Dalam *Accounting Principle Board* (APB) Statement no.4, akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternative (Harahap, 2007:5). Lebih jauh lagi Bambang Sudibyo

dalam (Harahap, 2007:6) mendefinisikan secara lebih praktis bahwa akuntansi adalah “*technology*”, yaitu mengubah data atau bukti-bukti transaksi menjadi model informasi yang lebih bermanfaat bagi para pemakainya.

3. Definisi Teori Akuntansi

Suwardjono (2008: 20-23) mendefinisikan teori akuntansi diantaranya teori akuntansi ditinjau dari akuntansi sebagai *science* dan akuntansi sebagai penalaran logis. Sebagai *science*, teori akuntansi merupakan seperangkat hipotesis-hipotesis yang bersifat deskriptif sebagai hasil penelitian dengan menggunakan metoda ilmiah tertentu. Sedangkan sebagai penalaran logis, teori akuntansi merupakan penalaran logis, gagasan-gagasan mendasar, atau gagasan-gagasan yang berkaitan dan konsisten, yang semuanya dapat disebut sebagai “penalaran logis”. Karena akuntansi diperlakukan sebagai teknologi, proses penalaran logis tersebut dapat disebut sebagai *perekayasaan*.

Hendriksen (1970) dalam (Harahap, 2007:99) mendefinisikan teori akuntansi sebagai alasan yang logis dalam bentuk suatu set prinsip yang luas yang: (1) memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip

akuntansi dapat dinilai, dan (2) menjadi pedoman pengembangan praktik dan prosedur yang baru.

B. Perumusan Teori Akuntansi

Belkaoui dan Godfey dalam (Harahap, 2007:109) mengemukakan bahwa dalam merumuskan teori akuntansi, dikenal beberapa metode yang digunakan, yaitu:

1. Metode deskriptif (*pragmatic*)

Metode deskriptif menyatakan bahwa teori akuntansi mencoba menjawab pertanyaan “Apa”. Pada metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan dan karenanya metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif.

2. Metode *Pscychological pragmatic*

Metode ini berdasarkan pada reaksi pemakai laporan keuangan terhadap *output* akuntansi itu (laporan keuangan) yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip atau pedoman.

3. Metode *normatif* (1950-1960)

Berdasarkan metode ini, teori akuntansi mencoba menjawab pertanyaan “Apa yang semestinya”. Pada metode ini, akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak

peduli apakah berlaku atau dipraktekan sekarang atau tidak.

4. Metode *positif* (1970-an)

Metode ini diawali dari suatu teori atau mode ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Berdasarkan teori ini lalu dirumuskan problem penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori, selanjutnya dikembangkan teori untuk menjelaskan fenomena tadi dan dilakukan penelitian secara terstruktur dan peraturan yang standar dengan melakukan perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data dan pengujian statistik ilmiah. Model ini dikenal dengan model penelitian kuantitatif, yang selanjutnya juga pada metode ini berkembang pula model dengan penelitian kualitatif.

Dalam (Ghazali dan Chariri, 2014:57), perumusan teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga kategori, yaitu berdasarkan (1) metode penalaran yang digunakan, (2) sistem bahasa yang digunakan, dan (3) tujuan perumusan. Adapun deskripsi masing-masing kategori perumusan teori akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan teori akuntansi berdasarkan metode penalaran

Berdasarkan metode penalaran yang digunakan, teori akuntansi dapat dirumuskan dengan berbagai pendekatan, yaitu deduktif, induktif, etika, sosiologi, ekonomi dan elektik.

2. Perumusan teori akuntansi berdasarakan sistem bahasa

Berdasarkan sistem bahasa yang digunakan, perumusan teori akuntansi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu teori sintaktik, teori semantik dan teori pragmatik.

3. Perumusan teori akuntansi berdasarkan tujuan perumusan

Berdasarkan tujuan perumusannya, teori akuntansi dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori akuntansi normatif yang memberikan resep terhadap praktik akuntansi, dan teori akuntansi positif yang berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena yang berkaitan dengan akuntansi.

BAB II

PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONESIA

Pada bagian ini, akan dideskripsikan perkembangan akuntansi yang mencakup perkembangan akuntansi secara internasional dan sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia (ditinjau dari perkembangan model akuntansi yang digunakan dan ditinjau berdasarkan periodisasi perkembangannya).

A. Perkembangan Ilmu Akuntansi

Munculnya gelombang *scientific management* dan bertambah meluasnya kepemilikan dan keterlibatan berbagai pihak dalam manajemen perusahaan (pegawai, banker, partner, pajak, LSM dan pemerintah), merupakan dua faktor pemicu *perkembangan yang pesat* dari ilmu akuntansi (Harahap, 2007:43). Adapun salah satu penjelasan tentang perkembangan ilmu akuntansi sebagaimana yang disebutkan oleh Leo Herbert (1972) dalam (Harahap, 2007:43-45), bahwa perkembangan akuntansi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1**Tahap Perkembangan Ilmu Akuntansi**

Tahun	Perkembangan Akuntansi
1775	Mulia dikenal pembukuan baik single entry maupun doble entry
1800	Masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan utama yang digunakan dalam penilaian perusahaan
1825	Mulai dikenal pemeriksaan keuangan (<i>financial auditing</i>)
1850	1. Laporan rugi laba menggantikan laporan neraca yang dianggap lebih penting 2. Perkembangan auditing semakin cepat dan audit dilakukan berdasarkan catatan atau laporan
1900	1. Di USA mulai dikenal sertifikasi profesi melalui ujian secara nasional 2. Akuntansi dianggap sudah dapat memberikan laporan pajak 3. <i>Cost accounting</i> mulai dikenal termasuk laporan dan statistic biaya dan produksi
1925	1. Mulai dikenal akuntansi pemerintahan dan pengawasan terhadap dana pemerintah 2. Teknik analisis biaya mulai diperkenalkan 3. Laporan keuangan mulai diseragamkan 4. Norma pemeriksaan akuntansi mulai dirumuskan 5. Sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalnya <i>Punch Card Record</i>. 6. Mulai diperkenalkan akuntansi untuk perpajakan.
1925 - 1975	1. Akuntansi mulai menggunakan computer untuk pengolahan data 2. Perumusan prinsip akuntansi (GAAP) sudah dilakukan. 3. Analisis Cost Revenue semakin dikenal. 4. Jasa-jasa perpajakan seperti konsultan pajak dan perencanaan pajak mulai ditawarkan profesi akuntansi 5. <i>Management Accounting</i> sebagai bidang akuntansi yang khusus untuk kepentingan manajemen mulai dikenal dan berkembang pesat. 6. Muncul jasa-jasa manajemen seperti sistem perencanaan dan pengawasan. 7. Perencanaan manajemen mulai dikenal, demikian juga <i>Management Auditing</i>.

B. Perkembangan Akuntansi berdasarkan Model Akuntansi yang digunakan

Berdasarkan model akuntansi yang digunakan, Dalam (Ghazali dan Chariri, 2014), sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akuntansi model Belanda dan Akuntansi model Amerika, yang deskripsi perkembangan atau sejarahnya sebagai berikut:

1. Praktik akuntansi pertama kali ditemui pada tahun 1747 yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan *Ampioen Sociteyt* yang berkedudukan di Jakarta, dimana pada era tersebut diperkenalkan sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli.
2. Tahun 1907 mulai dikenalkan fungsi auditing dengan dikirimnya auditor pertama ke Indonesia yaitu *Van Schagen*. Fungsi *auditing* yang dilakukan pada masa itu disebabkan oleh perkembangan kegiatan ekonomi Belanda di Indonesia yang semakin meningkat dan Belanda mulai melakukan penanaman modal di Indonesia.
3. Pengiriman *Van Schagen* juga merupakan titik awal berdirinya Jawatan Akuntan Negara (*Government Accountant Dienst*). Akuntan publik yang pertama

berdiri saat itu adalah kantor akuntan Frese & Hogeweg, tahun 1918. Selanjutnya kantor akuntan H.Y. Voerens tahun 1920.

4. Orang Indonesia yang pertama bekerja di bidang akuntansi adalah JD Massie, sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak, pada 21 September 1929.
5. Tahun 1942-1945 mulai muncul kesempatan munculnya akuntan lokal, karena mundurnya Belanda dari Indonesia.
6. Tahun 1950an atau era kemerdekaan, praktik akuntansi masih menggunakan akuntansi model Belanda.
7. Tahun 1958, terjadi nasionalisasi atas perusahaan Belanda dan pindahnya orang Belanda dari Indonesia, yang menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli, sehingga sejak saat itu, praktik akuntansi di Indonesia mulai berpaling kepada akuntansi model Amerika.
8. Tahun 1952-1964, perkembangan Perguruan Tinggi yang membuka Jurusan Akuntansi, selanjutnya mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika.

9. Tahun 1970, seluruh lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika.
10. Tahun 1980an, pada praktik akuntansi berkembang 3 jenis pembukuan, *pertama* pembukuan riil untuk dasar pengambilan keputusan, *kedua* pembukuan yang menunjukkan hasil positif untuk digunakan berkaitan dengan keperluan kredit dari Bank, dan *ketiga* pembukuanyang menunjukkan hasil negatif untuk tujuan pajak.
11. Tahun 1990an, terjadi tekanan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yang disebabkan oleh terjadinya berbagai skandal pelaporan keuangan.
12. Beberapa Regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan yaitu:
 - a. Pada September 1994, pemerintah Indonesia melalui IAI mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
 - b. Bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan proyek pengembangan akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntan.

- c. Tahun 1995 pemerintah membuat berbagai aturan yang berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, dan memasukan aspek akuntansi/pelaporan keuangan kedalam Undang-undang Pasar Modal.

C. Perkembangan Akuntansi Berdasarkan Periodisasi

Berdasarkan periodisasi perkembangannya, Harahap (2007:47) mendeskripsikan sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia yang dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman kolonial dan zaman kemerdekaan. Adapun deskripsi sejarah perkembangannya pada dua periode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zaman VOC

Ans Saribanon Sapiie (1980) mengemukakan bahwa menurut Stible dan Stroomberg, bukti autentik mengenai catatan pembukuan di Indonesia paling tidak sudah ada menjelang pertengahan abad ke-17, hal itu ditunjukkan dengan adanya sebuah Intruksi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1642 yang mengharuskan dilakukan pengurusan pembukuan atas peneimaan uang, pinjaman-pinjaman, dan jumlah uang yang diperlukan untuk pengeluaran (eksploitasi)

garnisun-garnisun dan galangan kapal yang ada di Batavia dan Surabaya.

2. Zaman Penjajahan Belanda

Setelah VOC bubar pada tahun 1799, kekuasaan diambil alih oleh kerajaan Belanda. Kekuasaan Belanda berlangsung dari tahun 1800-1942. Berkaitan dengan akuntansi, catatan pembukuan pada waktu itu menekankan pada mekanisme debit kredit, yang antara lain dijumpai pada pembukuan *Amphioen Socyteit* di Batavia, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha peredaran candu atau morfin. Selanjutnya pada abad ke-19, banyak didirikan atau masuk perusahaan Belanda di Indonesia. Catatan pembukuannya merupakan modifikasi dari sistem Venesia-Italia, dan tidak dijumpai adanya kerangka pemikiran konseptual untuk mengembangkan sistem pencatatan tersebut.

Pada masa penjajahan Belanda, segmen bisnis menengah kebawah dikuasai oleh pedagang keturunan Cina, India dan Arab, dimana pada saat itu, kaitannya dengan bidang akuntansi, penyelenggaraan pembukuan dilaksanakan secara bebas, sehingga praktik pembukuannya menggunakan atau dipengaruhi oleh sistem asal entitas yang bersangkutan.

3. Zaman Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, kondisi pembukuan tidak mengalami perkembangan yang berarti, praktik pembukuan pada masa itu masih menggunakan pola pembukuan Belanda.

4. Zaman Kemerdekaan

Sistem akuntansi yang berlaku awalnya di Indonesia adalah sistem akuntansi Belanda yang lebih dikenal dengan sistem tata baku. Sejalan dengan kondisi Indonesia yang telah merdeka, perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi, dan mulailah masuk modal asing, yang pada saat itu modal asing terutama masuk dari Amerika. Sejak saat itulah sistem akuntansi modal Amerika masuk ke Indonesia, mulai berkembang bersama dengan sistem akuntansi model Belanda dan akhirnya menggantikan sistem akuntansi model Belanda.

Perkembangan akuntansi setelah kemerdekaan dapat dikelompokkan pada tiga era kepemimpinan, yaitu era kepemimpinan presiden Soekarno (1945-1966), presiden Soeharto (1966-1988), dan presiden setelah Soeharto. Pada era kepemimpinan presiden Soekarno, akademisi lulusan Amerika banyak mengisi kekosongan posisi akuntan, dan sistem

akuntansi dan auditing amerika dikenalkan di Indonesia, sehingga pada era ini, baik akuntansi model belanda maupun akuntansi model amerika masih digunakan secara bersama. Pada era ini juga, didirikan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 1957, untuk memberi pedoman dan mengkoordinasi aktivitas akuntan (Ghazali & Chariri, 2014:109).

Tahun 1966-1998 atau era kepemimpinan Soeharto, perkembangan akuntansi diantaranya yaitu terjadinya transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara langsung dari Kantor pusat perusahaan asing kepada karyawan Indonesia. Di Era ini juga, IAI pada tahun 1973 mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta *professional code of conduct*. Prinsip-prinsip akuntansi didasarkan pada pedoman akuntansi yang dipublikasikan AICPA tahun 1965. Selain itu, tahun 1995 standar akuntansi internasional diadopsi dalam praktek akuntansi di Indonesia. Adapun di era setelah kepemimpinan Soeharto, perkembangan akuntansi terjadi dengan adanya penggetatan regulasi untuk memperbaiki pengungkapan informasi (Ghazali & Chariri, 2014:109).

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI

A. Definisi dan Urgensi Kerangka Konseptual

FASB (1978) dalam (Ghazali &Chariri, 2014:162) mendefinisikan kerangka konseptual sebagai “Suatu sistem yang *koheren* tentang tujuan (*objectives*) dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan”.

Belkaoui (1993) dalam (Ghazali dan Chariri, 2014:162) menyatakan bahwa, kerangka konseptual dapat dipandang sebagai *teori akuntansi yang terstruktur*. Dikatakan demikian karena struktur dari kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi, yang didasarkan pada proses penalaran logis, dimana dari proses penalaran logis ini, teori merupakan proses pemikiran menurut kerangka konseptual tertentu untuk menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru.

Kerangka konseptual merupakan landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi. Tidak adanya kerangka konseptual dapat mengakibatkan penyusunan standar akuntansi diperalat oleh pihak tertentu untuk menghasilkan standar yang menguntungkan pihak tersebut, atau dapat dikatakan bahwa kerangka konseptual dapat melindungi profesi akuntansi dari politisasi untuk kepentingan pihak yang tidak semestinya, sehingga kepentingan umum dikorbankan (Suwardjono, 2008:113).

Terlepas dari masih adanya kemungkinan beberapa kelemahan atau kekurangan dari kerangka konseptual sebagai upaya memecahkan masalah akuntansi, FASB mengidentifikasi bahwa terdapat 5 manfaat dari adanya kerangka konseptual, yaitu (Ghazali dan Chariri, 2014:166):

1. Kerangka konseptual dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi,
2. Kerangka konseptual sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul,
3. Kerangka konseptual sebagai dasar untuk membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan,

4. Kerangka konseptual dapat meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada, dan
5. Meningkatkan keterbandingan statemen keuangan antar perusahaan.

B. Komponen Kerangka Konseptual

Berdasarkan upaya publikasi di Amerika dan dan dorongan akan kebutuhan terhadap kerangka konseptual yang dapat diterima secara umum, maka pada tahun 1978-1985, dihasilkan enam komponen kerangka konseptual yang diberi nama *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1-6.

Tabel 2
Komponen Kerangka Konseptual SFAC

SFAC	Judul	Isi	Tahun
1	<i>Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises</i>	Tujuan yang akan dicapai dalam pelaporan keuangan	1978
2	<i>Qualitative Characteristics of Accounting Information</i>	Kualitas informasi yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan agar bermanfaat	1980
3	<i>Elements of Financial Statements of Business Enterprises</i>	Definisi dan karakteristik laporan keuangan	1980
4	<i>Objectives of Financial Reporting by Non Business Organization</i>	Tujuan yang akan dicapai dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba	1980

5	<i>Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise</i>	Kriteria pengakuan dan atribut pengukuran elemen laporan keuangan	1984
6	<i>Elements of Financial Statement a Placement of FASB Concept Statement No 3</i>	Mengganti SFAC No 3 dan berlaku juga bagi organisasi nirlaba	1985

Dari enam komponen kerangka konseptual tersebut dibangun 3 level kerangka konseptual, yang deskripsinya sebagai berikut (Ghazali dan Chariri, 2014:167-168) :

a. Level Pertama: Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan berarti ke arah mana segala upaya, tindakan dan pertimbangan dicurahkan. Dalam konteks pelaporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan akan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang akhirnya akan menentukan bentuk, isi, jenis dan susunan *statement* keuangan. Penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan proses yang kompleks, karena beragamnya pemakai laporan keuangan yang memiliki beragam kepentingan, diantaranya: kepentingan pertanggung jawaban, kebermanfaatan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dan pengukuran kinerja entitas (Suwardjono, 2008:145-146) .

Tujuan pelaporan keuangan merupakan level pertama dari kerangka konseptual akuntansi, yang terdapat pada SFAC No. 1 dan 4. Adapun tujuan pelaporan keuangan tersebut yaitu (Ghazali dan Chariri, 2014:169):

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan.
2. Memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakailainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan.
3. Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomisuatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban suatu perusahaan untuk menyerahkan sumber-sumber pada entitas lain atau pemilik modal), dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut.
4. Menyediakan informasi tentang hasil usaha (performa keuangan) suatu perusahaan selama satu periode.

b. Level Kedua: Karakteristik Kualitatif dan Elemen Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan adalah level kedua dalam kerangka konseptual akuntansi, yang terdapat pada SFAC No. 2 dan 3 (yang selanjutnya No.3 diganti dengan SFAC No.6). Level kedua pada kerangka konseptual akuntansi ini berfungsi untuk “menjembatani” antara level pertama (*why of accounting* atau tujuan pelaporan keuangan) dengan level ketiga (*how of accounting* atau pengakuan dan pengukuran). Deskripsi berkaitan dengan karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan sebagai berikut (Ghazali dan Chariri, 2014:171-177):

1. Karakteristik kualitatif laporan keuangan

FASB dalam SFAC No.2 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria dasar dalam *memilih metode* akuntansi dan pelaporan keuangan, dan *persyaratan* pengungkapan (*disclosure*).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari relevansi dan keandalan(*reliability*)

sebagai *kualitas primer*, daya banding & konsistensi sebagai *kualitas sekunder*, dan *cost-benefit & materialitas* sebagai *kendala dan kriteria* untuk mengakui informasi akuntansi.

a) Relevansi atau keberpautan, yaitu kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan, sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Oleh karena itu, relevansi dalam konteks laporan keuangan berarti kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan dari kejadian masa lalu, sekarang dan masa mendatang, atau dalam mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan-harapan (Suwardjono, 2008: 169). Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tersedia tepat waktu (Ghazali dan Chariri, 2014: 173).

b) Keterandalan, yaitu kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi

tersebut benar atau valid. Keterandalan berkaitan erat dengan sumber informasi dan cara merepresentasi, mendeskripsi, atau menyimbolkannya (Suwardjono, 2008: 171).

- c) Daya banding (*comprability*), yaitu kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik. Informasi tentang suatu badan usaha akan bertambah manfaatnya jika ia dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang badan usaha yang sama untuk suatu perioda yang lain atau suatu saat yang lain (Suwardjono, 2008:175).
- d) Konsistensi menunjukkan penggunaan metode yang sama oleh perusahaan sepanjang periode. Konsistensi tidak berarti bahwa perusahaan tidak dapat mengubah metode akuntansi yang telah dipilih, tetapi perusahaan boleh melakukan perubahan selama perubahan yang dilakukan tersebut diungkapkan secara jelas pada laporan keuangan (Ghazali dan Chariri, 2014:174).

- e) *Cost-benefit* berarti bahwa informasi akuntansi keuangan akan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan selama manfaat yang diperoleh melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya (Ghazali dan Chariri, 2014:174).
- f) *Materiality* atau materialitas, yaitu besar kecilnya atau magnituda (jumlah rupiah) suatu penghilangan atau penyalah sajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh penghilangan/pengabaian atau penyalahsajian tersebut (Suwardjono, 2008:178).

2. Elemen laporan keuangan

Dalam SFAC No.3 dijelaskan bahwa laporan keuangan memiliki 10 elemen, yaitu aktiva, hutang, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan dan kerugian.

- a) Aktiva (*assets*), yaitu *manfaat ekonomik* yang mungkin terjadi *dimasa mendatang* yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai *akibat* transaksi atau *peristiwa dimasa lalu*.
- b) Hutang/Kewajiban (*Liabilities*), yaitu *pengorbanan manfaat ekonomi* yang mungkin terjadi *dimasa mendatang* yang berasal dari *kewajiban sekarang* suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau menyerahkan jasa pada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu.
- c) Ekuitas, yaitu *hak sisa atas aktiva* suatu entitas setelah *dikurangi dengan hutang*.
- d) Investasi oleh pemilik adalah *kenaikan aktiva neto* suatu perusahaan yang berasal dari transfer dari entitas lain ke perusahaan tersebut atas sesuatu yang bernilai untuk *memperoleh atau meningkatkan hak kepemilikan* dalam perusahaan tersebut.
- e) Distribusi pada pemilik adalah *penurunan aktiva neto* suatu perusahaan yang berasal dari

transfer aktiva, penyerahan jasa, atau penambahan hutang *oleh perusahaan kepada pemilik*.

- f) Laba komprehensif, yaitu *perubahan ekuitas* suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya dari *sumber yang bukan berasal dari pemilik*.
- g) Pendapatan, yaitu *aliran masuk* atau *kenaikan aktiva* suatu entitas atau penurunan hutang suatu entitas (atau kombinasi keduanya) selama satu periode, yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya, yang merupakan *kegiatan utama perusahaan* secara terus menerus.
- h) Biaya, yaitu *aliran keluar* atau *pemakaian aktiva* suatu entitas atau penambahan hutang suatu entitas (atau kombinasi keduanya) selama satu periode, yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan

kegiatan utama perusahaan secara terus menerus.

- i) Keuntungan, yaitu *kenaikan ekuitas* dari transaksi insidentil suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu periode *diluar transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik.*
- j) Kerugian, yaitu *penurunan ekuitas* dari transaksi insidentil suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu periode *diluar transaksi yang berasal dari biaya dan distribusi pada pemilik.*

c. Level Ketiga: Asumsi dasar (Postulat), Prinsip dan Batasan

Postulat, Prinsip dan Keterbatasan merupakan level ketiga dari kerangka konseptual akuntansi, yang terdapat pada SFAC No.5 (kriteria pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan).Level ketiga pada kerangka konseptual akuntansi ini berfungsi

sebagai pedoman operasional dalam mengukur dan mengakui elemen laporan keuangan, serta menyajikan informasi keuangan.

1. Asumsi dasar (*postulat*) akuntansi

Postulat akuntansi adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya, dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi dan hukum tempat akuntansi dipraktikan. Postulat akuntansi terdiri dari 4 asumsi dasar, yaitu: Kesatuan usaha (*The economic entity*), Kontinuitas usaha (*Going concern*), Penggunaan unit moneter (*Monetary unit*), dan Periodisasi pelaporan (*The accounting period postulate*).

2. Prinsip akuntansi (*Accounting Principles*)

Prinsip akuntansi diartikan sebagai seperangkat aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis, dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Prinsip akuntansi terdiri dari 4 prinsip, yaitu: Prinsip harga pertukaran (*The historical cost principle*), Prinsip pendapatan (*The revenue principle*), Prinsip penandingan

(*Thematchingprinciple*), dan Prinsip pengungkapan penuh (*Full disclosure principle*).

3. Keterbatasan akuntansi (*Constraint*)

Keterbatasan akuntansi berkaitan dengan 2 kendala utama, yaitu hubungan biaya-manfaat (*cost-benefit*) dan berkaitan dengan 2 kendala lainnya yang berkaitan dengan lingkungan yaitu praktik industri dan *konservatisme*.

C. Kerangka Konsptual Akuntansi di Indonesia

Kerangka konseptual di Indonesia dikenalkan pada bulan September 1994, dimana IAI mengambil kebijakan untuk mengdopsi kerangka konseptual yang telah disusun oleh IASC sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut disetujui oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994, dan disahkan oleh pengurus pusat IAI pada tanggal 7 September 1994. Kerangka konseptual tersebut oleh IAI dinamakan dengan istilah “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)”. Kerangka konseptual atau KDPPLK tersebut meliputi: (1) tujuan dan ruang lingkup, (2) tujuan & pemakai laporan keuangan, (3) asumsi dasar, (4) karakteristik kualitatif dan kendala

informasi, (5) Elemen laporan keuangan, dan (6) pengakuan dan pengukuran (Ghazali dan Chariri, 2014:186-191).

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan kerangka konseptual adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Adapun ruang lingkup dari kerangka konseptual yaitu berkaitan dengan: (a) tujuan laporan keuangan, (b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, (c) definisi, pengakuan dan pengukuran elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan, dan (4) konsep modal serta pemeliharaan modal.

2. Tujuan dan Pemakai Laporan Keuangan

Terdapat dua tujuan dari laporan keuangan, yaitu *pertama*, menurut IAI, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi **pemakai** dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, laporan keuangan juga bertujuan untuk dijadikan sebagai pertanggung jawaban pengelolaan perusahaan

oleh manajemen atau sumberdaya yang dipercayakan padanya.

Berdasarkan tujuan tersebut maka laporan keuangan selalu terkait dengan pihak pemakai. Adapun pemakai laporan keuangan meliputi: (a) Investor, (b) Kreditor, (c) Pemasok, (d) Karyawan, (e) Pelanggan, (f) Pemerintah, dan (g) Masyarakat.

3. Asumsi Dasar

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) disebutkan bahwa terdapat dua asumsi dasar dalam akuntansi, yaitu dasar akrual dan kelangsungan hidup.

Penyusunan laporan keuangan dengan asumsi dasar bermaksud untuk mencapai tujuan laporan keuangan, yaitu memberikan informasi tentang masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, serta kewajiban pembayaran kas dimasa mendatang dan sumber daya yang menggambarkan kas yang akan diterima dimasa mendatang. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi dasar akrual, pengaruh peristiwa diukur dan diakui/dicatat dalam laporan keuangan *pada saat terjadinya*, bukan pada saat diterima atau dikeluarkannya kas.

Penyusunan laporan keuangan dengan asumsi dasar kelangsungan hidup mengasumsikan bahwa, perusahaan akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya dimasa mendatang.

4. Karakteristik Kualitatif dan Kendala Informasi

IAI menggunakan tiga (3) karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: dapat dipahami (*understandability*), relevan/keandalan (*reliability*), dan daya banding (*comparability*). Selain tiga karakteristik kualitatif tersebut, IAI juga mengakui adanya kendala dalam memenuhi kualitas laporan keuangan tersebut, diantaranya adalah ketepatan waktu penyajian, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan antara karakteristik kualitatif.

5. Elemen Laporan Keuangan

IAI hanya mengakui lima (5) elemen dari laporan keuangan, yaitu : (a) Aktiva, (b) Kewajiban, (c) Ekuitas, (d) Penghasilan, dan (e) Beban.

6. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan, sedangkan *Pengukuran*

adalah proses *penentuan jumlah rupiah* untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca atau laporan rugi laba. Beberapa dasar yang digunakan dalam pengukuran tersebut diantaranya yaitu: biaya historis, biaya terkini, nilai realisasi/penyelesaian, dan nilai sekarang.

BAB IV

STANDAR AKUNTANSI

A. Definisi Standar Akuntansi

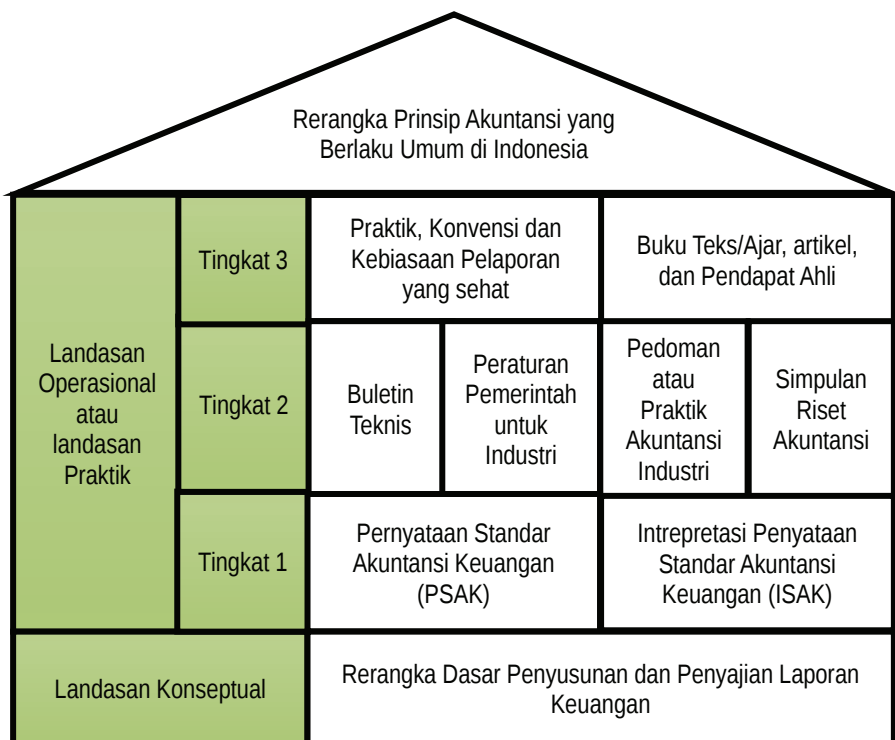
Standar akuntansi adalah seperangkat prinsip, konsep, metode, teknik yang sengaja dipilih oleh penyusun standar akuntansi untuk diberlakukan dalam suatu negara, yang dituangkan dalam dokumen resmi dan dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan (Suwardjono, 2014:122). Sementara itu, menurut Ghozali dan Chariri (2014:223) standar akuntansi didefinisikan sebagai “pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu”.

Standar akuntansi merupakan bagian dari Prinsip Akuntansi Berterima Umum yang memberikan aturan-aturan umum praktis untuk membantu pekerjaan akuntan. Umumnya standar akuntansi terdiri dari tiga bagian yaitu deskripsi masalah yang dihadapi, diskusi logis atau cara pemecahannya serta hal-hal terkait dengan keputusan/teori, diajukan suatu solusi. Sedangkan berdasarkan subyek standar, standar akuntansi ke dalam empat tipe. *Pertama*, akuntan harus memberitahukan

kepada pemakai mengenai metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan. *Kedua*, membantu pencapaian keseragaman penyajian laporan keuangan. *Ketiga*, menghendaki pengungkapan hal khusus yang berpengaruh pada pertimbangan pemakai. *Keempat*, menghendaki keputusan implisit atau eksplisit yang harus dibuat.

Menurut Harahap (2011: 154), dalam penyusunan standar akuntansi terdapat tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah penyusunan standar akuntansi diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan atau mekanisme pasar. Kemungkinan kedua, penyusunan standar akuntansi diserahkan kepada swasta/profesi. Dan kemungkinan yang terakhir adalah penyusunan standar akuntansi diserahkan kepada Pemerintah. Umumnya standar akuntansi disusun oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, profesi dan umum. Di Indonesia, badan yang berwenang dalam penyusunan standar akuntansi adalah Dewan Standar Akuntansi (DSAK) yang berada dibawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berikut ini merupakan gambaran Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (Harahap, 2011:156):

Gambar 1
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di
Indonesia



Praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia didasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang diadopsi dari GAAP Amerika Serikat. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa level dasar menunjukkan landasan konseptual pelaporan keuangan yaitu KDPPLK. Sementara itu, level selanjutnya

yaitu landasan operasional atau landasan praktik yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Landasan operasional tingkat 1 adalah standar akuntansi yaitu PSAK dan ISAK yang menjadi landasan utama pelaporan keuangan. Apabila terdapat praktik akuntansi atau masalah-masalah terkait dengan pelaporan keuangan yang tidak diatur dalam PSAK dan ISAK, maka dapat digunakan landasan operasional tingkat selanjutnya.

Standar akuntansi berisi tentang definisi, pengukuran / penilaian, pengakuan dan pengungkapan elemen/akun-akun laporan keuangan. Standar akuntansi umumnya akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan praktik akuntansi yang ada. Standar akuntansi dapat direvisi/diamandemen, ditambah dengan standar baru, atau bahkan dihapus. Berikut ini penjelasannya lebih lanjut :

1. Revisi standar akuntansi yaitu mengubah suatu aturan/ketentuan dalam standar yang telah ada, atau menambahkan aturan baru dalam standar tersebut.
2. Penambahan standar baru berarti penyusun standar akuntansi membuat standar akuntansi baru tentang masalah akuntansi tertentu yang

belum diatur dalam standar yang diberlakukan sebelumnya.

3. Penghapusan standar akuntansi dilakukan karena penyusun standar menilai bahwa standar akuntansi tersebut tumpang tindih dengan standar akuntansi atau interpretasi standar akuntansi yang lain. Penghapusan standar juga dapat disebabkan karena standar tersebut tidak relevan dengan praktik akuntansi yang ada.

B. Manfaat Standar Akuntansi

Standar akuntansi tidak hanya bermanfaat bagi penyusun laporan keuangan saja melainkan juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan yang lain seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, auditor, dll. Menurut Ghazali dan Chariri (2014:224) manfaat standar akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi akuntansi kepada pengguna laporan keuangan tentang posisi keuangan, hasil usaha / kinerja perusahaan dan hal lain yang terkait dengan perusahaan.
2. Memberikan pedoman dan aturan bagi auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.

3. Memberikan data dasar bagi pemerintah tentang segala hal penting yang terkait dengan pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi dan peningkatan efisiensi dan tujuan lainnya.
4. Menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi pihak-pihak yang tertarik dengan disiplin ilmu akuntansi.

C. Perbedaan Standar Akuntansi, Prinsip Akuntansi dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)

Laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas bisnis harus disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (*generally accepted accounting principle* atau GAAP). Prinsip ini akan menentukan bagaimana kualitas informasi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas bisnis tersebut (Ghozali, 2014).

GAAP didefinisikan sebagai berikut:

Sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun, menyajikan dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu.

Suwardjono (2014) menjelaskan perbedaan prinsip akuntansi (*accounting principles*), standar akuntansi (*accounting standards*), dan akuntansi berterima umum (GAAP). Prinsip akuntansi merupakan segala ideologi, kaidah, konsep, postulat, prosedur dan teknik akuntansi yang tersedia secara teoritis maupun praktis yang berfungsi untuk pengetahuan. Sementara itu, standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik yang dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar yang berlaku. Sedangkan PABU merupakan suatu pedoman yang terdiri dari standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang telah berlaku.

D. Tahap Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia

Standar akuntansi di Indonesia disusun oleh IAI. Adapun *due process procedure* penyusunan dan pencabutan standar akuntansi keuangan /standar akuntansi keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi isu akuntansi
- b. Konsultasi isu dengan DKS dalam hal ini diperlukan
- c. Melakukan riset terbatas
- d. Pembahasan materi standar akuntansi keuangan / standar akuntansi keuangan syariah
- e. Pengesahan dan publikasi *exposure draft*.

- f. Pelaksanaan *public hearing*
- g. Pelaksanaan *limited hearing* (jika diperlukan)
- h. Pembahasan masukan public
- i. Pengesahan standar akuntansi keuangan / standar akuntansi keuangan syariah

E. Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Perkembangan standar akuntansi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Selama masa penjajahan Belanda, tidak ada standar akuntansi yang dipakai, melainkan standar gaya Belanda (*Sound Business Practices*).
2. Tahun 1974, disusun standar akuntansi pertama yang disebut dengan Prinsip Akuntansi di Indonesia (PAI). PAI disusun oleh IAI dengan mengacu pada *United States Generally Accepted Accounting Principles* (US GAAP).
3. Tahun 1984, Prinsip Akuntansi Indonesia ditetapkan menjadi Standar Akuntansi dan diterbitkan Undang-Undang Prinsip Akuntansi Indonesia.
4. Pada tahun 1994, Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar akuntansi internasional (*International Accounting Standards/IAS*) yang disusun oleh *International Accounting Standard Committee* (IASC). Pada tahun 2002, penyusun

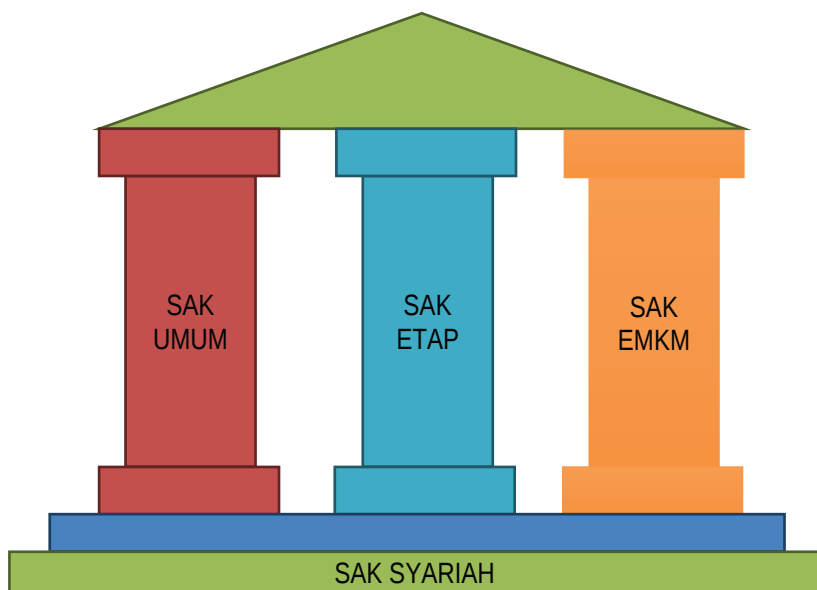
standar akuntansi internasional (IASC) berubah menjadi International Accounting Standards Boards (IASB) dan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan setelah tahun 2002 disebut dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.

5. Tahun 2008 IAI mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergensi IFRS dalam pengaturan standar akuntansi keuangan yang diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012.
6. Tahun 2012, Indonesia secara penuh mengadopsi/konvergensi IFRS. Konvergensi tersebut menghasilkan produk Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Juni 2012.
7. Tahun 2015, DSAK IAI telah mengesahkan penyesuaian dan amandemen atas beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta mengesahkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). SAK efektif per 1 Januari 2015 terdiri dari produk berbasis IFRS seperti PSAK dan ISAK baru, revisi, amandemen, dan yang telah melalui proses penyesuaian.

F. Pilar Standar Akuntansi di Indonesia

Saat ini terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2
Pilar Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia



oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI pada tanggal 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. Berikut penjelasan 4 pilar SAK di atas.

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum

SAK Umum berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi

Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah IAI (DSAS IAI). SAK wajib diterapkan oleh entitas dengan akuntabilitas publik seperti: emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). SAK Umum telah mengadopsi standar akuntansi internasional yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Indonesia melakukan adopsi penuh pada 1 Januari 2012 (tahap 1). Kemudian proses adopsi tahap 2 efektif 1 Januari 2015. Secara umum, PSAK telah disesuaikan/konvergensi dengan aturan yang ada dalam IFRS sehingga disebut sebagai PSAK berbasis IFRS. Namun, ada beberapa PSAK yang tidak mengacu pada aturan IFRS sehingga disebut PSAK Non IFRS. Adapun PSAK Non IFRS adalah sebagai berikut (Wahyuni, 2018):

- a. PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
- b. PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- c. PSAK 38: Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
- d. PSAK 44: Pendapatan Real Estate
- e. PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

- f. PSAK 70: Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
- g. ISAK 25: Hak atas Tanah
- h. ISAK 31: Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13 (Properti Investasi)
- i. ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan
- j. PSAK Syariah No. 101-111

Sementara itu, berikut ini IFRS terbaru yang belum maupun yang sudah diadopsi kedalam PSAK:

- a. IFRS 9 *Financial Instruments* (efektif 1 Januari 2018): sudah diadopsi menjadi PSAK 71
- b. IFRS 14 *Regulatory Deferral Accounts* (efektif 1 Januari 2016): belum diadopsi karena dinilai tidak relevan untuk Indonesia
- c. IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers* (efektif 1 Januari 2017): diadopsi menjadi PSAK 72
- d. IFRIC 21 *Levies* (efektif 1 Januari 2014): sudah diadopsi menjadi ISAK 30
- e. Amandemen IAS 41 *Agriculture* (efektif 1 Januari 2016): sudah diadopsi menjadi amandemen PSAK 16 berlaku 1 Januari 2018 bersama PSAK 69 Agrikultur.
- f. IFRS 16 *Leases*: PSAK 73 sudah dikeluarkan

- g. IFRS 17 *Insurance Contract*: akan diadopsi dan masuk agenda kerja DSAK 2017
- h. IFRIC 22 *Foreign Currency Transactions and Advance Transaction*: telah diadopsi menjadi ISAK 33
- i. IFRIC 23 *Uncertainty over income tax treatment*: diadopsi menjadi ISAK 34

Adapun PSAK yang diberlakukan mulai 2016, 2018 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
PSAK Berlaku Tahun 2016, 2018, 2020

No	PSAK	Tanggal Efektif Diberlakukan
a.	PSAK 69 Agrikultur	1 Januari 2018
b.	PSAK 70 Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	Juni 2016 (sesuai dengan tanggal efektif UU pengampunan pajak)
C	PSAK 71 Instrumen Keuangan	1 Januari 2020
D	PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	1 Januari 2020
E	PSAK 73 Sewa	1 Januari 2020

Tabel 4
Daftar PSAK Berbasis IFRS

No	IFRS		PSAK	
1	IFRS 1	<i>First-time Adoption of International Financial Reporting Standards</i>		Tidak diadopsi
2	IFRS 2	<i>Share-Based Payment</i>	PSAK 53	Pembayaran Berbasis Saham
3	IFRS 3	<i>Business Combination</i>	PSAK 22	Kombinasi Bisnis
4	IFRS 4	<i>Insurance Contracts</i>	PSAK 62	Kontrak Asuransi
5	IFRS 5	<i>Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations</i>	PSAK 58	Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
6	IFRS 6	<i>Exploration for and Evaluation of Mineral Resources</i>	PSAK 64	Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
7	IFRS 7	<i>Financial Instruments: Disclosure</i>	PSAK 60	Instrumen Keuangan: Pengungkapan
8	IFRS 8	<i>Operating Segments</i>	PSAK 5	Segmen Operasi
9	IFRS 9	<i>Financial Instruments</i>	PSAK 71	Instrumen Keuangan

10	IFRS 10	<i>Consolidated Financial Statements</i>	PSAK 65	Laporan Keuangan Konsolidasian
11	IFRS 11	<i>Joint Arrangements</i>	PSAK 66	Pengaturan Bersama

12	IFRS 12	<i>Disclosure of Interest in other Entities</i>	PSAK 67	Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
13	IFRS13	<i>Fair Value Measurements</i>	PSAK 68	Pengukuran Nilai Wajar
14	IFRS 14	<i>Regulatory Deferral Accounts</i>	NA	Tidak diadopsi
15	IFRS 15	<i>Revenue from Contracts with Customers</i>	PSAK 72	Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
16	IFRS 16	<i>Leases</i>	PSAK 73	Sewa

Tabel 5
Daftar ISAK Berbasis IFRS

No	IFRS		PSAK	
1	IFRIC 1	<i>Changes in Existing</i>	ISAK 9	Perubahan atas Liabilitas Purna

		<i>Decommissioning, Restoration and similar liabilities</i>		Operasi, Liabilitas Restorasi dan Liabilitas Serupa
2	IFRIC 2	<i>Members' Share in Cooperation Entities and similar instruments</i>		Tidak diadopsi
3	IFRIC 4	<i>Determining whether an arrangements contains a lease</i>	ISAK 24	Evaluasi Substansi beberapa Transaksi yang Mengandung Bentuk Legal Sewa
4	IFRIC 5	<i>Rights to interests arising from Decommissioning, Restoration and environmental rehabilitation funds</i>		Tidak diadopsi
5	IFRIC 6	<i>Liabilities arising from Participating in a Specific Market</i>		Tidak diadopsi
6	IFRIC 7	<i>Applying the Restatement Approach under IAS 29</i>	ISAK 19	Penerapan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

7	IFRIC 9	<i>Reassessment of Embedded Derivatives</i>	ISAK 25	Hak atas Tanah (akan dicabut)
8	IFRIC 10	<i>Interim Financial Reporting and Impairment</i>	ISAK 17	Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
9	IFRIC 12	<i>Service Concession Arrangements</i>	ISAK 16	Pernjanjian Konsesi Jasa
10	IFRIC 13	<i>Consumer Loyalty Programmes</i>	ISAK 10	Program Loyalitas Pelanggan
11	IFRIC 14	<i>The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction</i>	ISAK 15	Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
12	IFRIC 15	<i>Agreements for the Construction of Real Estate</i>	ISAK 21	Perjanjian Konstruksi Real Estate
13	IFRIC 16	<i>Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation</i>	ISAK 13	Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
14	IFRIC 17	<i>Distribution of Non-cash Assets to Owners</i>	ISAK 11	Distribusi Aset Nonkas kepada pemilik
15	IFRIC 18	<i>Transfers of</i>	ISAK	Pengalihan Aset

		<i>Assets from Customers</i>	27	dari Pelanggan
16	IFRIC 19	<i>Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments</i>	ISAK 28	Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
17	IFRIC 20	<i>Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mining</i>	ISAK 29	Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka
18	IFRIC 21	<i>Levies</i>	ISAK 31	Pungutan
19	IFRIC 22	<i>Foreign Currency Transactions and Advance Considerations</i>	ISAK 33	Transaksi Valutas Asing dan Imbalan di muka
20	IFRIC 23	<i>Uncertainty over Income Tax Treatment</i>	ISAK 34	Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP merupakan SAK yang mengatur transaksi yang dilakukan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang memiliki bentuk pengaturan lebih sederhana dalam hal perlakuan

akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP adalah standar yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum. Dalam standar ini, pencatatan pos-pos laporan keuangan sebagian besar menggunakan konsep biaya historis. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan.

Entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) adalah perusahaan/entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas / pertanggungjawaban publik yang signifikan (perusahaan yang tidak terdaftar di bursa efek dan bukan perusahaan yang berbentuk bank, perusahaan asuransi, pedagang efek (pialang), atau dana pensiun).
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal yaitu: pemilik perusahaan yang tidak terlibat langsung dalam usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP menggunakan acuan IFRS untuk *Small and Medium Enterprises (SMEs)*. Tahun 2011 perusahaan harus memilih menjadi menggunakan PSAK-IFRS atau PSAK-ETAP.

3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan mikro, kecil dan menengah. Adapun kriteria perusahaan yang dapat menggunakan SAK EMKM yaitu (Wahyuni, 2018):

Tabel 6
Kriteria Penggunaan SAK EMKM

Memenuhi Definisi ETAP	Memenuhi Kriteria UMKM sesuai dengan UU No. 20/2008 tentang UMKM
a. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. b. Menerbitkan laporan keuangan untuk	a. <u>Bukan anak perusahaan/cabang perusahaan</u> yang dimiliki/dikuasai/menjadi bagian, secara langsung

tujuan umum bagi pengguna eksternal	atau tidak langsung (Pasal 1) b. <u>Rentang kuantitatif tertentu</u>: Memenuhi jumlah kekayaan bersih tertentu (tidak termasuk tanah dan bangunan)/hasil penjualan tahunan (Pasal 6) c. <u>Tidak memiliki/menguasai</u> UMKM mitra usahanya (Pasal 35)
-------------------------------------	---

Jika suatu perusahaan memenuhi kriteria di atas selama minimal 2 tahun berturut-turut, maka dapat menggunakan SAK EMKM sebagai acuan penyusunan laporan keuangannya. Adapun perbedaan SAK ETAP dan SAK EMKM adalah sebagai berikut (Wahyuni, 2018):

Tabel 7
Perbedaan Struktur SAK ETAP dan SAK EMKM

Struktur SAK ETAP	Padanan dalam SAK EMKM
Bab 1. Ruang Lingkup	Bab 1. Ruang Lingkup
Bab 2. Konsep dan Prinsip Pervasif	Bab 2. Konsep dan Prinsip Pervasif
Bab 3. Penyajian Laporan	Bab 3. Penyajian Laporan

Keuangan	Keuangan
Bab 4. Neraca	Bab 4. Laporan Posisi Keuangan
Bab 5. Laporan Laba Rugi	Bab 5. Laporan Laba Rugi
Bab 6. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	-
Bab 7. Laporan Arus Kas	-
Bab 8. Catatan Atas Laporan Keuangan	Bab 6. Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab 9. Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan	Bab 7. Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan
Bab 10. Investasi pada Efek Tertentu	Bab 8. Aset dan Liabilitas Keuangan
Bab 11. Persediaan	Bab 9. Persediaan
Bab 12. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak	-
Bab 13. Investasi pada Joint Venture	Bab 10. Investasi pada Ventura Bersama
Bab 14. Properti Investasi	-
Bab 15. Aset Tetap	Bab 11. Aset Tetap
Bab 16. Aset Tetap Tidak Berwujud	Bab 12. Aset Tetap Tidak Berwujud
Bab 17. Sewa	Bab 14. Pendapatan dan Beban
Bab 18. Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi	Bab 13. Liabilitas dan Ekuitas
Bab 19. Ekuitas	
Bab 20. Pendapatan	Bab 14. Pendapatan dan Beban
Bab 21. Biaya Pinjaman	
Bab 22. Penurunan Nilai Aset	
Bab 23. Imbalan Kerja	

Bab 24. Pajak Penghasilan	Bab 15. Pajak Penghasilan
Bab 25. Mata Uang Pelaporan	Bab 3. Penyajian Laporan Keuangan (Rupiah)
Bab 26. Transaksi dalam Mata Uang Asing	Bab 16. Transaksi dalam Mata Uang Asing
Bab 27. Peristiwa setelah Akhir Periode Pelaporan	-
Bab 29. Ketentuan Transisi	Bab 17. Ketentuan Transisi
Bab 30. Tanggal Efektif	Bab 18. Tanggal Efektif
Daftar Istilah	-
-	Contoh Ilustratif Laporan Keuangan Entitas
-	Dasar Kesimpulan

1. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

SAK syariah digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, baitul maal wat tamwil (BMT), perusahaan asuransi syariah, dll maupun lembaga non syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah dikembangkan berdasarkan model PSAK Umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa MUI. Saat ini terdapat 11 PSAK syariah (No.

101-111) dan 1 exposure draft (ED) PSAK 112 yaitu :

Tabel 8
Daftar PSAK Syariah

Standar	Judul Standar
PSAK No. 101	Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK No. 102	Akuntansi Murabahah (Revisi 2013)
PSAK No. 103	Akuntansi Salam
PSAK No. 104	Akuntansi Istishna
PSAK No. 105	Akuntansi Mudharabah
PSAK No. 106	Akuntansi Musyarakah
PSAK No. 107	Akuntansi Ijarah
PSAK No. 108	Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
PSAK No. 109	Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah
PSAK No. 110	Akuntansi Sukuk
PSAK No. 111	Akuntansi Wa'ad
ED PSAK 112	Akuntansi Wakaf

BAB V

KONSEP ASET

A. Definisi Aset

Aset adalah manfaat ekonomi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh perusahaan dan timbul dari peristiwa masa lalu.

Dari definisi di atas, dapat diuraikan bahwa terdapat 3 karakteristik utama aset yaitu:

1. Memiliki Manfaat Ekonomi di Masa yang Akan Datang

Aset baik itu berupa sumber-sumber ekonomi maupun potensi jasa harus bermanfaat bagi perusahaan. Artinya aset tersebut dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai, dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai atau digunakan untuk melunasi utang. Jadi manfaat ekonomi masa mendatang yang terkandung dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk berkontribusi dalam menghasilkan kas atau setara kas bagi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, persediaan barang dagangan berkontribusi

langsung untuk menghasilkan kas karena dapat dijual kepada konsumen. Ini berarti bahwa persediaan barang dapat ditukarkan dengan aset lain yang memiliki nilai, yaitu kas. Contoh lainnya, mesin mampu memberikan manfaat ekonomi karena digunakan untuk memproduksi barang sehingga barang tersebut dapat dijual dan akhirnya dapat menghasilkan kas. Secara umum, manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh perusahaan dengan cara:

- a. Digunakan untuk memproduksi barang dan jasa
- b. Dapat ditukarkan dengan aset lain
- c. Dapat digunakan untuk melunasi utang
- d. Dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan/pemegang saham

Contoh aset sebagai sumber-sumber ekonomi yaitu:

- a. Sumber-sumber ekonomi yang produktif, seperti:
 - 1) Bahan baku (*raw materials*), tanah, peralatan, hak paten, dan sumber ekonomi lain yang dapat digunakan dalam proses produksi

- 2) Hak kontrak untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi milik entitas lain seperti hak guna bangunan (sewa dibayar dimuka), dll.
- b. Produk, yaitu barang dagang yang siap dijual (*finished goods*) atau barang yang masih dalam proses produksi
- c. Uang / kas
- d. Klaim untuk menerima uang (piutang)
- e. Hak pemilikan pada perusahaan lain

2. Diperoleh atau Dikendalikan oleh Perusahaan

Sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai aset apabila perusahaan tertentu dapat menggunakan manfaat yang terkandung didalamnya serta menguasai /mengendalikannya sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan aset tersebut. Yang perlu ditekankan di sini adalah untuk dapat mencatat aset dalam laporan keuangan, perusahaan tidak harus memiliki aset tersebut tetapi yang penting adalah menguasai/mengendalikannya. Hal ini dikarenakan akuntansi menerapkan konsep *Substance Over Form* (Substansi Mengungguli Bentuk), artinya substansi

atau realitas ekonomi suatu transaksi lebih diutamakan dalam akuntansi dibandingkan dengan status hukumnya.

Dengan demikian, apabila suatu perusahaan mempunyai hak untuk menggunakan manfaat suatu sumber ekonomi dan mampu mencegah akses pihak lain atas sumber ekonomi tersebut, maka perusahaan dapat mencatatnya sebagai aset walaupun secara hukum entitas tersebut tidak memilikinya. Contoh:

Perusahaan A membeli 5 unit mobil box senilai Rp 1 miliar dari sebuah dealer dengan membayar uang muka Rp 250 juta, dan sisanya akan dibayar secara angsuran dalam waktu 5 tahun.

Jika dilihat dari perspektif hukum, mobil tersebut masih dimiliki oleh dealer karena dokumen kepemilikannya ada pada *dealer* dan belum menjadi hak milik perusahaan A. Namun demikian, ditinjau dari substansi ekonominya, setelah membayar uang muka, perusahaan A memiliki hak untuk menggunakan mobil box tersebut dalam kegiatan operasinya. Oleh karena itu, perusahaan A dapat mencatat mobil box tersebut sebagai aset dalam laporan keuangannya.

Suatu aset dapat dikendalikan oleh perusahaan dengan cara:

- a. Pembelian
- b. Pemberian (hibah)
- c. Penemuan
- d. Perjanjian
- e. Produksi
- f. Penjualan
- g. Pertukaran

3. Berasal dari Transaksi Masa Lalu

Suatu sumber ekonomi dapat dicatat sebagai aset apabila benar-benar terjadi transaksi di masa lalu untuk memperolehnya, bukan transaksi yang baru direncanakan dikemudian hari. Sebagai contoh: suatu gedung dapat dicatat sebagai aset perusahaan A apabila gedung tersebut benar-benar telah dibeli atau diperoleh hak pengendaliannya dari transaksi yang sah secara hukum. Apabila perusahaan A baru menandatangani kontrak pembangunan gedung, maka perusahaan belum bisa mencatatnya sebagai aset dan nilai kontrak tersebut tidak bisa diakui sebagai nilai aset. Kontrak yang belum dilaksanakan oleh salah satu pihak disebut kontrak eksekutori (*executory contract*),

yang berarti bahwa kontrak tersebut belum berlaku karena salah satu pihak yang melakukan perjanjian belum melakukan kewajibannya. Sebagai contoh kasus gedung di atas, pihak kontraktor belum mulai melakukan pembangunan gedung sehingga gedung tersebut belum bisa dicatat sebagai aset.

B. Penilaian Aset

Pengukuran (*measurement*) yaitu proses penentuan angka satuan pengukur atas suatu obyek untuk menunjukkan makna tertentu obyek tersebut. Obyek yang diukur dapat berupa barang, jasa, manusia, binatang, dan sebagainya. Makna tertentu suatu obyek dapat berupa nilai, luas, berat, jumlah, volume, tinggi, umur, indeks prestasi dan lain-lain. Jika unit moneter (satuan uang) menjadi satuan pengukur, maka pengukuran disebut dengan penilaian. Dengan demikian, penilaian yaitu proses penentuan jumlah rupiah suatu obyek untuk menentukan makna ekonominya dalam laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa konsep pengukuran lebih luas dari konsep penilaian.

Dalam akuntansi, umumnya pengukuran digunakan untuk menunjukkan jumlah rupiah yang harus dicatat pada saat suatu obyek diperoleh.

Sementara itu, penilaian umumnya menunjukkan penentuan jumlah rupiah dari setiap pos atau elemen yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Dalam konteks aset, penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah setiap aset yang harus disajikan dalam laporan keuangan untuk menunjukkan makna ekonominya. Dalam hal ini, penilaian berarti proses untuk menentukan berapa rupiah setiap aset seperti kas, perlengkapan, piutang, dll akan dicatat dalam laporan keuangan.

1. Tujuan Penilaian Aset

Menentukan nilai rupiah setiap aset bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar nilai sumber daya/kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga *stakeholder* memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, penilaian aset adalah bagian dari tujuan pelaporan keuangan. Adapun tujuan pengukuran dan penilaian aset adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu tahap yang dilakukan agar dapat menyajikan laporan posisi keuangan.
- b. Sebagai salah satu tahap pengukuran nilai laba.

- c. Untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder*.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan tertentu.

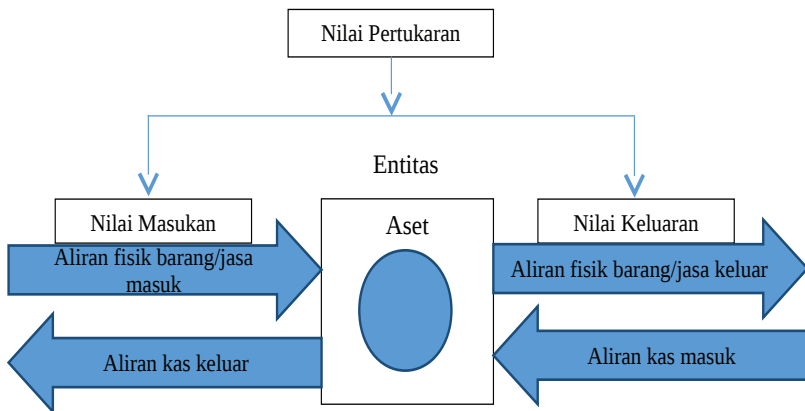
2. Dasar Penilaian Aset

Dasar penilaian aset dapat dilihat dari dua dimensi yaitu arah aliran aset (nilai masukan/nilai keluaran) dan waktu (masa lalu, sekarang, masa mendatang). Menurut Suwardjono (2014) dasar pengukuran aset yang paling valid adalah harga pertukaran (*exchange price*) karena dinilai paling obyektif sehingga memenuhi karakteristik kualitatif informasi yaitu keandalan. Terdapat dua perspektif nilai atau harga pertukaran, yaitu harga pertukaran pada saat aset diperoleh (nilai masukan) dan pertukaran dalam pemanfaatan aset (dikonsumsi/dijual) yang disebut dengan nilai keluaran.

Nilai masukan (*input values*) yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan untuk memperoleh aset (input) yang akan digunakan dalam

kegiatan operasional perusahaan. Sementara itu, nilai keluaran (*output values*) yaitu aliran dana (kas) yang diperkirakan dapat diperoleh perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran. Berikut ini gambaran dari nilai masukan dan nilai keluaran.

Gambar 3
Nilai Masukan dan Nilai Keluaran Sebagai Dasar Penilaian Aset



Berdasarkan gambar di atas, yang dimaksud dengan nilai masukan adalah jumlah kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu transaksi pertukaran (pembelian) untuk memperoleh suatu aset (input barang/jasa). Sementara itu, nilai keluaran yaitu sejumlah kas yang akan diterima oleh perusahaan di masa yang akan datang apabila suatu aset keluar dari

perusahaan baik itu karena dikonsumsi maupun dijual. Penilaian aset berdasarkan dimensi arah aliran aset dan waktu menghasilkan 6 dasar pengukuran sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut (Hendriksen dan Van Breda, 1992 dalam Suwardjono, 2014):

Tabel 9
Dasar Pengukuran Aset Berdasarkan Dimensi Waktu dan Aliran Aset

	Nilai Masukan	Nilai Keluaran
Masa lalu	Kos historis (<i>historical cost</i>)	Harga jual masa lalu (<i>past selling prices</i>)
Sekarang	Kos pengganti (<i>replacement cost</i>)	Harga jual sekarang (<i>current selling price</i>)
Masa mendatang	Kos harapan (<i>expected costs</i>)	Nilai terealisasi harapan (<i>Expected realizable values</i>)

a. Nilai Masukan (*Input Values*)

Nilai masukan adalah jumlah rupiah yang harus dikeluarkan oleh suatu entitas/perusahaan untuk memperoleh suatu aset. Sebagai contoh: perusahaan A membayar uang sebesar Rp 100.000.000 untuk membeli mesin, maka nilai masukannya sebesar jumlah tersebut. Berikut ini dasar penilaian yang

termasuk kedalam kategori nilai masukan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 10
Dasar Penilaian Kategori Nilai Masukan

No	Dasar Penilaian	Definisi	Keterangan
1	Kos Historis	Harga pertukaran barang pada saat diperoleh (dibeli).	Merupakan dasar pengukuran yang paling obyektif (andal) untuk menilai aset yang baru diperoleh. Namun kelemahannya, kos historis kurang relevan karena nilai aset dapat berubah. Kos standar (<i>standard cost</i>) adalah dasar penilaian yang termasuk dalam konsep kos historis. Kos standar: kos/biaya sekarang saat perusahaan beroperasi dalam kondisi normal
2	Kos Masukan Terkini (<i>current input cost</i>) /	Harga pertukaran (jumlah uang) yang harus dikeluarkan /	Dasar penilaian ini sering digunakan untuk menilai persediaan barang. Nilai wajar (<i>fair value</i>) adalah alternatif penilaian

	Kos Pengganti (<i>replacement cost</i>)	dibayar oleh perusahaan pada saat sekarang untuk memperoleh aset yang sejenis dalam kondisi yang sama	yang termasuk kategori kos masukan terkini. Nilai wajar adalah: jumlah rupiah yang dapat diterima untuk suatu obyek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dalam kondisi bebas/tanpa tekanan.
3	Kos Harapan (<i>discounted future cost</i>)	Nilai sekarang dari pengorbanan ekonomi di masa mendatang apabila potensi jasa tertentu (aset) diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Dapat diartikan pula: nilai sekarang dari sejumlah uang yang harus dibayar di masa mendatang	Dasar penilaian ini dapat digunakan jika terdapat kepastian harga potensi jasa (aset) di masa yang akan datang atau harganya dapat ditaksir dengan cukup pasti. Pos-pos aset berwujud seperti aset lancar dan aset tetap dapat menggunakan dasar penilaian ini.

		untuk memperoleh aset sekarang.	
--	--	---------------------------------	--

a. Nilai Keluaran (*Output Values*)

Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau non kas yang diterima oleh suatu unit usaha jika suatu aset atau potensi jasa pada akhirnya keluar dari perusahaan baik itu dijual maupun ditukar dengan aset lain. Dasar penilaian ini umumnya digunakan untuk mengukur aset yang tujuannya untuk dijual atau dikonversi menjadi kas seperti persediaan barang dagang, surat berharga, atau peralatan dan tanah yang sudah tidak diperlukan untuk proses produksi. Beberapa dasar penilaian yang termasuk kedalam kategori nilai keluaran yaitu dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 11
Dasar Penilaian Kategori Nilai Keluaran

No	Dasar Penilaian	Definisi	Keterangan
1	Harga jual masa lalu (<i>past selling price</i>)	Jumlah kas yang cukup pasti akan diterima dari konversi suatu	Aset yang dapat menggunakan dasar penilaian ini yaitu piutang usaha karena jumlah rupiah piutang usaha

		aset yang timbul karena transaksi masa lalu.	merupakan harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu adalah salah satu bentuk khusus dari nilai terealisasi bersih (<i>net realizable value</i>). Nilai terealisasi bersih yaitu: seluruh kas yang akhirnya dapat diperoleh atas konversi piutang atau penjualan barang dagangan sampai transaksinya tuntas. <i>Net realizable value</i> dapat digunakan untuk menilai piutang dan persediaan barang dagangan.
2	Harga Jual Sekarang (<i>current selling price</i>)/ Harga Keluaran Sekarang (<i>current output price</i>)	Didasari oleh konsep setara tunai sekarang (<i>current cash equivalent</i>), yaitu: Jumlah rupiah kas atau daya beli yang dapat diperoleh dari penjualan aset	Harga jual sekarang didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan akan berlangsung terus dan transaksi dilakukan dalam pasar yang normal. Jika tidak ada pasar regular (normal), penilaian dapat ditentukan atas dasar nilai likuidasi. Nilai likuidasi digunakan apabila

		di pasar bebas dalam kondisi perusahaan melikuidasi (menjual) asetnya secara normal	perusahaan tidak bisa menjual produk atau aset dalam saluran penjualan yang normal.
3	Nilai Terealisasi Harapan	Penerimaan kas atau potensi jasa di masa mendatang yang jumlah dan waktunya cukup pasti	Pos aset yang dapat menggunakan dasar penilaian ini misalnya: Investasi dalam obligasi, piutang wesel jangka panjang, deposito berjangka

C. Pengakuan Aset

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah kedalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pengakuan suatu pos / elemen harus memenuhi 4 kriteria yaitu (FASB, 1984 dalam Ghozali dan Chariri, 2014):

1. Definisi (*definition*)

Suatu pos dapat dicatat dalam pembukuan akuntansi jika memenuhi definisi elemen laporan keuangan.

2. Keterukuran (*measurability*)

Suatu pos atau akun harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya secara andal.

3. Relevansi (*relevance*)

Informasi yang terkandung dalam suatu pos bermanfaat atau sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

4. Keandalan (*reliability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menunjukkan transaksi yang sesungguhnya dan dapat diuji kebenarannya (*verifiable*).

Pada kenyataannya, terdapat beberapa pos yang memenuhi kriteria definisi tetapi tidak dicatat dalam struktur akuntansi (pembukuan). Sebagai contoh yaitu sumber daya manusia (karyawan). Jika dilihat dari segi definisi, karyawan memenuhi 3 karakteristik aset yaitu memberikan manfaat ekonomi atau potensi jasa bagi perusahaan di masa mendatang, dikendalikan oleh perusahaan dan berasal dari transaksi masa lalu. Namun demikian, karyawan tidak dapat dicatat sebagai akun dalam laporan keuangan karena nilainya tidak dapat diukur dengan satuan moneter. Oleh karena itu SDM tidak dapat diakui sebagai aset karena meskipun memenuhi kriteria

definisi, relevansi dan keandalan, tetapi tidak memenuhi kriteria keterukuran.

D. Masalah-Masalah Khusus Aset

Dalam pembahasan konsep aset, terdapat beberapa masalah yang menjadi perdebatan di kalangan pakar akuntansi. Masalah-masalah tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 12
Masalah-Masalah Khusus Terkait Aset

No	Transaksi	Masalah	Alternatif Solusi
1	Beban Tangguhan (<i>deferred charges</i>)	Apakah beban tangguhan dapat diklasifikasikan sebagai aset?	Beban tangguhan dapat dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan jika memenuhi 3 kriteria: a. Kos atau biaya yang dikeluarkan merupakan transaksi yang sah dan wajar b. Jika kos jasa (uang yang dikeluarkan perusahaan) memiliki manfaat di masa mendatang maka dapat dicatat

			sebagai beban tangguhan c. Transaksi pengeluaran tidak terjadi secara berulang-ulang setiap periode. Jika pengeluaran terjadi secara rutin, maka harus dibebankan langsung sebagai biaya pada periode terjadinya (dicatat dalam laporan laba rugi) Berdasarkan kriteria di atas, jika perusahaan mengeluarkan uang untuk transaksi yang sah dan wajar serta memiliki manfaat di masa mendatang maka nilainya kos/biaya tersebut dapat ditanggungkan pembebanannya dan dilaporkan sebagai aset. Contoh beban yang dapat dicatat sebagai
		Jenis beban tangguhan yang mana yang dapat diklasifikasikan sebagai aset?	

			aset yaitu: -Biaya/kos pendirian perusahaan (<i>organization cost</i>) -Biaya dibayar dimuka (sewa dibayar dimuka, asuransi dibayar dimuka, dll) -Biaya penelitian dan pengembangan
2	Kapitalisasi Bunga	Masalah muncul saat perusahaan membangun fasilitas fisik (cth: gedung) yang dananya berasal dari dana pinjaman dengan jangka waktu cukup lama. Masalahnya yaitu: -Apakah bunga dari dana pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi sebagai aset	Kapitalisasi yaitu pencatatan biaya dalam akun aset di laporan posisi keuangan. Umumnya biaya dicatat sebagai beban di laporan laba rugi, tetapi ada biaya-biaya/pengeluaran tertentu yang dapat dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Terdapat 3 alternatif perlakuan akuntansi terhadap bunga pinjaman: a. Bunga tidak dikapitalisasi Alasan yang

		dan nilainya dimasukkan kedalam biaya pembangunan fasilitas fisik tersebut? Dari ketiga alternatif pencatatan di atas mana yang paling baik?	mendukung bunga tidak dikapitalisasi yaitu karena bunga termasuk kos/biaya pendanaan dan bukan bagian dari biaya pembangunan fasilitas fisik. b. Bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai bagian dari biaya fasilitas fisik yang dibangun sendiri (digunakan sendiri oleh perusahaan) Salah satu alasan yang mendukung perlakuan akuntansi ini yaitu jika bunga dibebankan sebagai beban pendapatan pada tahun terjadinya, justru akan menimbulkan distorsi laba (tidak menunjukkan laba yang
--	--	--	--

			sesungguhnya). c. Bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya fasilitas fisik yang dibangun Biaya bunga perlu dikapitalisasi sendiri dan dicatat terpisah dari akun fasilitas fisik yang dibangun karena bunga adalah biaya pendanaan. Jika manfaat yang diperoleh dari kapitalisasi bunga lebih besar dibandingkan mencatatnya sebagai beban di laporan laba rugi, maka kapitalisasi adalah pilihan yang paling baik.
3	Pengeluaran kapital (<i>capital expenditure</i>). Pengeluaran kapital adalah pengorbanan sumber ekonomik	Bagaimana menentukan suatu pengorbanan ekonomi dianggap	Pengorbanan ekonomi/biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh fasilitas fisik dianggap sebagai pengeluaran

	yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh atau menggunakan fasilitas fisik dalam kegiatan operasi. Fasilitas fisik tersebut umumnya memiliki umur ekonomi yang panjang sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya tidak layak dibebankan secara langsung sebagai beban pengurang pendapatan di laporan laba rugi.	sebagai pengeluaran kapital atau tidak?	kapital jika memenuhi kriteria berikut ini: a. Untuk aktiva non moneter yang baru diperoleh/dibeli, suatu pengeluaran akan dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut bertujuan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva tersebut siap digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jadi, semua pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut harus dikapitalisasi. Contoh: Perusahaan A membeli fasilitas fisik berupa mesin senilai Rp 150 juta dan mengeluarkan biaya angkut Rp 1 juta, biaya pemasangan
--	---	--	--

			(instalasi) Rp 2 juta. Maka biaya angkut dan biaya pemasangan harus ditambahkan dengan harga beli mesin dan dicatat sebagai aset (mesin), bukan dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi. b. Untuk aset yang telah dipakai (aset lama), pengeluaran akan dikapitalisasi jika memenuhi syarat berikut ini: - Menambah kapasitas produksi aset tersebut - Menambah umur ekonomis - Menambah nilai aset
4	Aktiva Donasi/ Hibah	-Apakah sumber ekonomi yang diperoleh dari	-Sumber ekonomi yang diperoleh dari hibah atau donasi dapat diakui

		donasi dapat diakui sebagai aset? -Bagaimana mencatat nilai aset yang diperoleh dari hibah pihak lain?	sebagai aset walaupun perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Hal ini dikarenakan pengakuan aset tidak didasarkan pada sumber diperolehnya, tetapi didasarkan pada manfaat yang melekat pada aset tersebut. -Aktiva donasi dicatat sebesar nilai wajarnya
5	Transaksi Aktiva Non Moneter (contohnya Pertukaran aktiva tetap)	Bagaimana pencatatan nilai aset apabila aset tersebut diperoleh bukan dengan cara menyerahkan kas tetapi dengan menyerahkan aktiva non moneter?	Tentukan berapa rupiah kas yang akan diperoleh perusahaan jika aktiva non moneter tersebut dijual. Maka, harga perolehan aset dicatat sebesar perkiraan harga jual tersebut. a. Jika aset yang diperoleh (diterima) adalah aset tidak sejenis : nilainya dicatat sebesar nilai wajarnya b. Jika aset yang diperoleh adalah

			aset sejenis dengan aset yang diserahkan / ditukarkan, maka penilaian dilakukan dengan cara: - Jika timbul kerugian dari pertukaran tersebut, maka nilai aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan ditambah sejumlah kas tambahan yang dikeluarkan. - Jika terdapat keuntungan dari pertukaran aset sejenis tersebut , maka nilai aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang
--	--	--	--

			diserahkan ditambah sejumlah kas yang dikeluarkan - Jika terdapat keuntungan dan perusahaan juga menerima sejumlah uang, maka nilai aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan dikurangi proporsi tertentu dari nilai buku aset yang dijual.
--	--	--	--

BAB VI

KONSEP KEWAJIBAN

A. Definisi Kewajiban

Istilah kewajiban memiliki makna yang sama dengan utang. Namun demikian, dilihat dari konteks bahasanya, kewajiban merupakan istilah resmi yang digunakan dalam laporan keuangan sedangkan utang merupakan istilah umum yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjukkan adanya keharusan untuk membayar sejumlah uang di masa yang akan datang. Adapun definisi kewajiban diuraikan sebagai berikut.

1. Menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB)

Definisi kewajiban menurut FASB (penyusun standar akuntansi Amerika Serikat), sebagaimana disebutkan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 6 adalah:

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau

menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

2. Menurut *International Accounting Standard Committee* (IASC)

Kewajiban / liabilitas menurut IASC (penyusun standar akuntansi internasional) didefinisikan sebagai:

Kewajiban sekarang perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan menyebabkan aliran keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

3. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Menurut IAI (penyusun standar akuntansi di Indonesia), kewajiban didefinisikan sebagai:

Kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Dari definisi di atas, beberapa literatur teori akuntansi mengacu pada definisi kewajiban menurut FASB karena dinilai lebih komprehensif. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diuraikan 3 karakteristik kewajiban dalam tabel berikut ini.

Tabel 13
Karakteristik Kewajiban

No	Karakteristik Kewajiban	Penjelasan
1	Adanya pengorbanan ekonomi di masa mendatang yang cukup pasti, baik dengan cara menyerahkan kas atau barang maupun penyediaan	Pengorbanan ekonomi maksudnya adalah keharusan perusahaan untuk mengorbankan/ menyerahkan sumber ekonomi (aset) tertentu dalam bentuk kas atau barang maupun dengan menyediakan jasa bagi pihak lain di masa yang akan datang. Pengorbanan ekonomi yang cukup pasti berarti bahwa jumlah rupiah kas atau aset lain yang harus diserahkan, dapat

	jasa.	dinilai secara layak (akurat). Contoh: Perusahaan A meminjam uang di bank sebesar Rp 500 juta. Dalam konteks ini, yang dimaksud pengorbanan ekonomi yaitu perusahaan A memiliki tanggung jawab untuk mentransfer / menyerahkan kas atau aset lain di masa mendatang sesuai dengan jatuh tempo pinjaman.
2	Adanya keharusan sekarang	Kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang/jasa.
3	Timbul dari transaksi masa lalu (telah terjadi)	Transaksi masa lalu menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang

		harus dicatat sebagai utang dalam laporan posisi keuangan. Apabila perusahaan melakukan pembelian barang, maka yang dimaksud dengan transaksi masa lalu yaitu penerimaan barang, bukan pemesanan barang. Dengan demikian, kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (<i>executory contract</i>) tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kewajiban. Contoh: a. Walaupun perusahaan telah melakukan kontrak pembelian jangka panjang, tetapi tidak otomatis perusahaan dapat mencatat kewajiban/utang dalam laporan posisi keuangan. Setelah barang diterima perusahaan, maka kewajiban/utang sudah bisa
--	--	---

		dicatat dalam pembukuan. b. Pada saat perusahaan melakukan pemesanan barang kepada <i>supplier</i>, maka perusahaan belum bisa mencatat utang/kewajiban karena barangnya belum diterima.
--	--	--

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Kewajiban

Beberapa faktor yang mengakibatkan utang adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban Kontraktual

Kewajiban kontraktual yaitu kewajiban yang timbul karena adanya kontrak atau transaksi yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu kewajiban yang disebabkan karena transaksi tersebut wajib dilunasi. Dalam hal ini, perusahaan tidak bisa menghindari kewajiban tersebut karena memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Artinya jika perusahaan tidak melunasi kewajiban

kontraktual, maka dapat menyebabkan adanya sanksi secara hukum karena terdapat dokumen legal yang dapat diverifikasi. Contoh kewajiban kontraktual yaitu:

- a. Utang bank
- b. Utang pajak
- c. Utang obligasi
- d. Utang dagang / utang usaha
- e. Utang wesel

2. Kewajiban Konstruktif

Kewajiban ini timbul karena adanya kebijakan perusahaan untuk memajukan usahanya dalam rangka melaksanakan praktik bisnis yang baik (*best business practice*) dan nilai-nilai etika bisnis (*business ethics*) serta tidak dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban legal. Contoh kewajiban konstruktif yaitu:

- a. Tunjangan hari raya bagi karyawan
- b. Pengembalian uang (*refund*) kepada pelanggan apabila barang yang dijual cacat atau rusak
- c. Servis gratis yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor

3. Kewajiban Ekuitabel

Kewajiban ekuitabel adalah utang yang disebabkan adanya kebijakan perusahaan yang dilandasi oleh alasan moral, bukan karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Tidak ada sanksi hukum apabila perusahaan tidak menunaikan kewajiban ini, tetapi harus dilakukan oleh perusahaan karena dapat menimbulkan sanksi sosial/moral. Contoh kewajiban ini yaitu:

- a. Pemberian donasi/bantuan kepada lembaga amal
- b. Pemberian hadiah/bantuan bagi masyarakat di sekitar pabrik sebagai kompensasi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan

4. Kewajiban Kontinjensi (kewajiban bersyarat)

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban yang tidak pasti harus dipenuhi karena tergantung pada peristiwa yang terjadi di masa mendatang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Kebergantungan (*contingency*) yaitu suatu kondisi atau keadaan yang bersifat tidak pasti (*uncertain*) yang menyangkut laba (*gain contingency*) atau rugi

(*loss contingency*) yang mungkin terjadi. Contoh kewajiban kontinjensi yaitu: rugi atau laba yang mungkin ditimbulkan akibat sengketa hukum.

Kewajiban kontraktual, konstruktif dan ekuitabel dinilai memenuhi kriteria pengakuan utang/kewajiban karena adanya pengorbanan sumber ekonomik yang cukup pasti di masa mendatang. Sementara itu, untuk kewajiban kontinjensi, pengorbanan sumber ekonomik di masa yang akan datang belum pasti baik terkait dengan kemungkinan terjadinya (jadi atau tidak) maupun besarnya jumlah rupiah yang harus dibayar.

C. Penilaian Kewajiban

Penilaian mengacu pada penentuan jumlah rupiah / nilai keharusan sekarang (*the value of current obligation*) yang harus dicatat dalam laporan posisi keuangan. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Semakin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan semakin mendekati nilai nominal (*face value*) kewajiban. Penilaian kewajiban pada saat tertentu

adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi.

D. Pelunasan Kewajiban

Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi usaha normal (*in due course of business*) sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Membayar sejumlah kas sesuai dengan besarnya nilai kewajiban
- b. Menyerahkan aset
- c. Penyediaan / pemberian jasa kepada kreditor
- d. Penggantian suatu kewajiban dengan kewajiban yang lain
- e. Konversi kewajiban menjadi ekuitas

Salah satu cara untuk melunasi utang yaitu dengan mengubah/mengkonversi utang menjadi

ekuitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara perusahaan menerbitkan *convertible bonds* (obligasi konversi). Obligasi konversi merupakan salah satu jenis instrumen keuangan. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang surat berharga tersebut mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku (belum habis).

E. Penyajian Kewajiban dalam Laporan Keuangan

Secara umum, kewajiban disajikan dalam laporan posisi keuangan atas dasar urutan kelancarannya, sama dengan penyajian aset. PSAK No. 1 memuat ketentuan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Hal ini berarti bahwa kewajiban jangka pendek disajikan/dicatat lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang.

BAB VII

KONSEP EKUITAS

A. Definisi Ekuitas

a. Definisi Ekuitas Menurut IAI

Ekuitas yaitu hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

b. Definisi Ekuitas Menurut FASB

Ekuitas atau aset bersih adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban

Berdasarkan definisi di atas, dapat diuraikan karakteristik ekuitas berikut ini:

- a. Ekuitas sama dengan aktiva neto (aktiva bersih), yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan utang/kewajiban perusahaan.
- b. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang disebabkan adanya penurunan atau kenaikan aktiva bersih baik yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan (pendapatan dan biaya) maupun berasal dari investasi oleh pemegang saham atau distribusi kepada pemegang saham (dividen).

B. Komponen Ekuitas Pemegang Saham

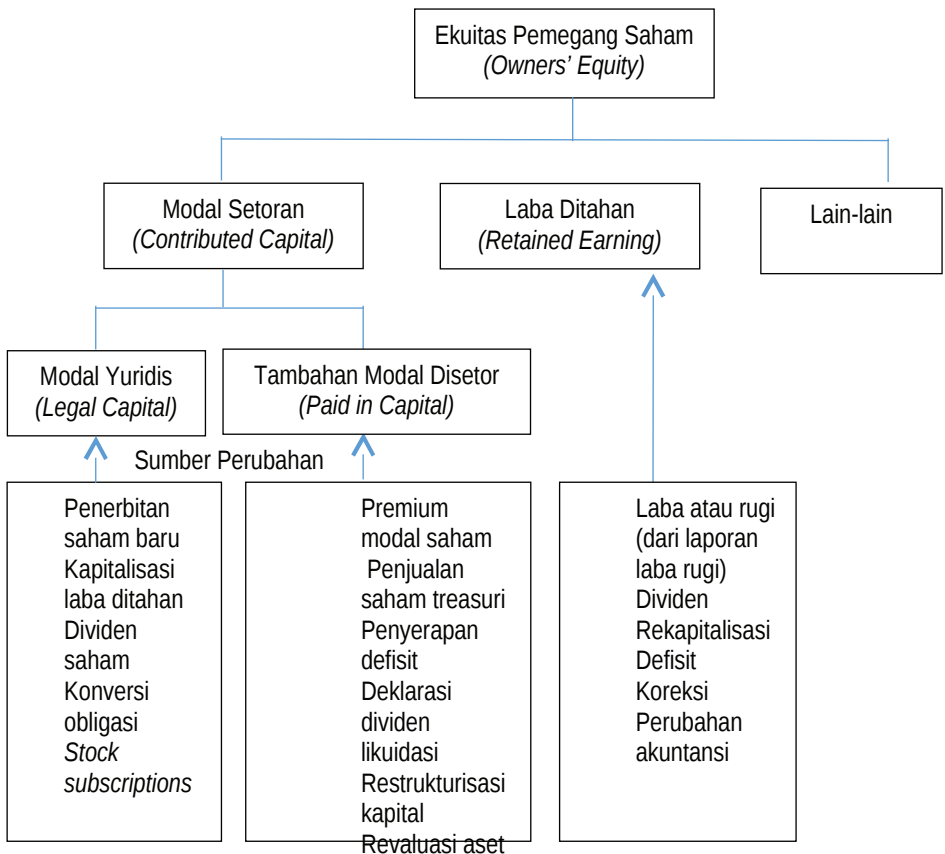
Ekuitas pemegang saham dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Modal setoran, yang dibagi menjadi modal saham (*capital stock*) sebagai modal yuridis, tambahan modal disetor (*additional paid in capital*), dan komponen lain yang mencerminkan transaksi pemilik (Contoh: saham treasuri dan modal donasi).

b. Laba ditahan (*retained earning*)

Adapun komponen ekuitas secara komprehensif dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4
Komponen Ekuitas Pemegang Saham



C. Tujuan Penyajian Ekuitas dalam Laporan Keuangan

Tujuan menyajikan nilai ekuitas pada laporan keuangan khususnya laporan posisi keuangan adalah:

- a. Untuk memberikan informasi kepada stakeholder terkait dengan efisiensi dan pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen (*stewardship*).
- b. Untuk menyediakan informasi tentang riwayat dan prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya.
- c. Untuk menginformasikan kewajiban yuridis perusahaan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya.

Agar tujuan di atas dapat tercapai, maka informasi yang harus disampaikan minimal mencakup:

- a. Sumber ekuitas pemegang saham dan riwayatnya.
- b. Peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengembalian modal setoran kepada pemegang saham.
- c. Urutan prioritas beberapa golongan pemegang saham (urutan proteksi).

D. Penyajian Modal Pemegang Saham

Penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam laporan posisi keuangan menunjukkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Pada saat terjadi defisit, urutan penyajian modal mencerminkan urutan penyerapan rugi sedangkan dalam kondisi likuidasi, urutan penyajian modal menggambarkan perlindungan hukum bagi pemilik dana (pemegang saham). Dengan demikian, berbagai hak atas aset disajikan atas dasar urutan siapa dulu yang menanggung kerugian apabila terjadi defisit dan siapa dulu yang memperoleh distribusi aset apabila terjadi likuidasi.

E. Teori Ekuitas

Teori ekuitas yaitu teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan pertimbangan pihak mana yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan. Penggunaan sudut pandang yang berbeda dalam akuntansi dapat menghasilkan format pelaporan yang berbeda. Adapun teori-teori ekuitas tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 14
Teori Ekuitas

No	Teori Ekuitas	Penjelasan
1	Teori Proprietary	Teori ini memusatkan perhatian pada pemilik sehingga dalam perspektif akuntansinya, tujuan perusahaan, jenis modal makna akun, dll semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik. Oleh karena itu, tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah: $Aktiva - Hutang = Modal$ Teori proprietary sangat sesuai diterapkan untuk perusahaan perseorangan dan firma.
2	Teori Entitas (Kesatuan Usaha)	Teori entitas adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya serta dapat bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri. Persamaan akuntansinya yaitu: $Aktiva = Hutang + Modal$

		Teori entitas cocok untuk diterapkan pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Terdapat 2 jenis teori entitas: a. Teori Entitas Versi Tradisional Menurut pandangan tradisional, perusahaan beroperasi untuk kepentingan pemegang ekuitas (<i>equity holder</i>), yaitu pihak yang telah memberi dana kepada perusahaan. b. Teori Entitas Versi Baru Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasi atas namanya sendiri dan terpisah dari pemilik perusahaan. Dalam teori ini, penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham bertujuan untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang saham agar mudah memperoleh tambahan dana apabila perusahaan membutuhkannya di masa yang akan datang.
3	Teori Ekuitas Residual	Ekuitas residual adalah satu jenis ekuitas dalam lingkup teori entitas. Ekuitas residual menunjukkan ekuitas pemegang saham biasa. Sementara itu, ekuitas khusus yaitu klaim kreditur dan ekuitas pemegang saham preferen. Namun, jika terjadi kasus kerugian yang begitu besar sehingga perusahaan mengalami kebangkrutan, ekuitas saham biasa dapat hilang sehingga pemegang

		saham preferen menjadi pemegang ekuitas residual. Adapun persamaan akuntansinya yaitu sebagai berikut: $\text{Aktiva} - \text{Ekuitas khusus} = \text{Ekuitas Residual}$ $\text{Aktiva} - (\text{klaim kreditor} + \text{ekuitas pemegang saham preferen}) = \text{ekuitas pemegang saham biasa}$ Pemegang saham biasa pada umumnya dianggap memiliki ekuitas residual (hak sisa) dalam hal klaim memperoleh laba dan klaim terhadap aktiva bersih. Dengan demikian, dalam teori ini, <u>pihak yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah pemegang saham biasa.</u> Oleh karena itu, <u>laporan laba rugi dan laporan terkait dengan laba ditahan harus menunjukkan laba yang tersedia bagi pemegang ekuitas residual (pemegang saham biasa), setelah dikurangi dengan semua kewajiban, termasuk dividen bagi pemegang saham preferen.</u> Selain itu, <u>laporan posisi keuangan juga harus memisahkan pos ekuitas pemegang saham biasa dan</u>
--	--	--

		<u>ekuitas pemegang saham preferen.</u>
4	Teori Enterprise	Teori enterprise adalah teori yang memiliki konsep lebih luas daripada teori entitas tetapi ruang lingkup dan aplikasinya kurang terdefinisikan dengan baik. Dalam teori entitas, perusahaan dipandang sebagai unit ekonomi terpisah yang dikelola untuk memberikan manfaat bagi pemegang saham. Sementara itu, <u>dalam konsep teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dikelola untuk memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yang meliputi pemegang saham, kreditur, karyawan, konsumen, pemerintah dan masyarakat umum.</u> Konsep teori ini cocok diterapkan untuk perusahaan skala besar dan modern yang memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh tindakannya kepada masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam aspek akuntansinya, tanggung jawab pelaporan keuangan tidak hanya ditujukan bagi pemegang saham, tetapi juga bagi pihak-pihak berkepentingan lainnya termasuk masyarakat.
5	Teori Dana	Dalam teori ini, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi adalah dana yang mencakup sekelompok aset dan

		kewajiban dan restriksi (batasan) yang mencerminkan aktivitas ekonomi. Persamaan akuntansinya yaitu: Aktiva = Restriksi Aktiva Konsep teori dana umumnya diterapkan dalam sektor pemerintahan dan organisasi nirlaba. Dalam sektor pemerintahan, dana yang digunakan meliputi dana umum (<i>general fund</i>) yang di Indonesia dikenal sebagai dana alokasi umum (DAU), selain itu dana pendapatan khusus (<i>special revenue fund</i>), dana proyek (<i>capital project fund</i>), dan dana pelunasan jangka panjang (<i>debt service fund</i>).
--	--	---

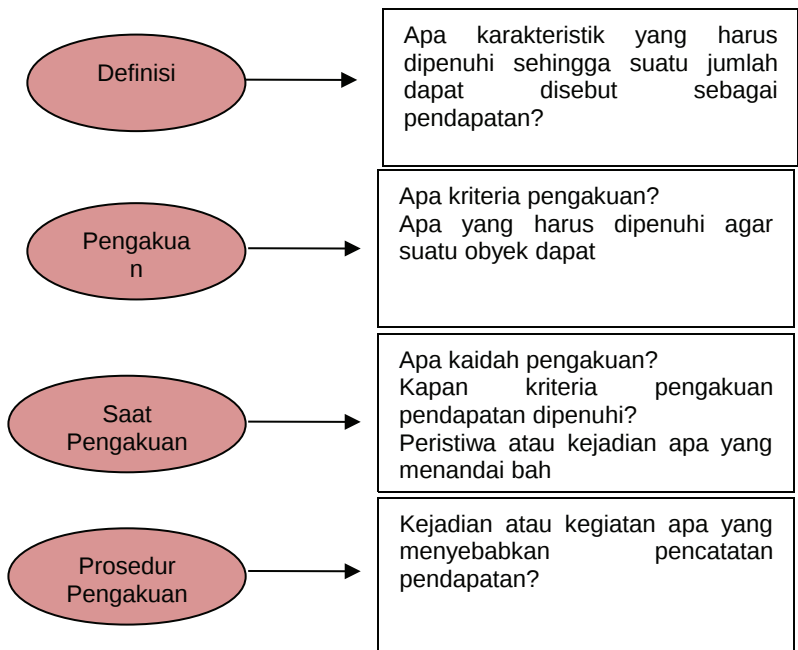
BAB VIII

PENDAPATAN (*REVENUE*)

A. Masalah Teoritis Pendapatan

Sebelum membahas definisi pendapatan, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai permasalahan terkait dengan pendapatan yang kemudian akan dijelaskan pada bagian-bagian selanjutnya. Berikut ini diuraikan masalah teoritis pendapatan menurut Suwardjono (2014).

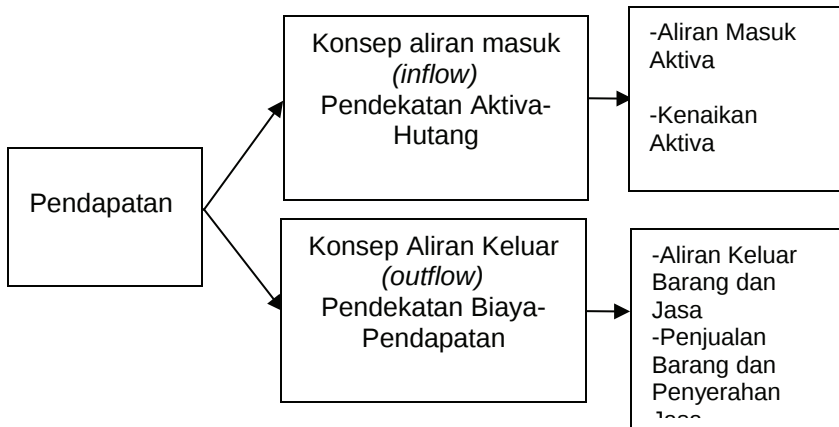
Gambar 5
Masalah Teoritis Pendapatan



B. Definisi Pendapatan

Pendapatan dapat didefinisikan berdasarkan aspek moneter dan aspek fisik. Dilihat dari aspek moneter pendapatan berhubungan dengan aliran masuk aktiva ke dalam perusahaan yang bersumber dari operasional perusahaan. Dilihat dari aspek fisik, pendapatan merupakan hasil akhir dari aliran fisik dalam proses untuk menghasilkan laba perusahaan berupa barang/jasa yang dihasilkan dari rangkaian proses produksi. Dengan kata lain, pendapatan dapat disebut sebagai produk perusahaan karena pendapatan timbul dan melekat dalam proses kegiatan perusahaan. Pendapat ini senada dengan yang disampaikan oleh Hendrikson bahwa konsep pendapatan dalam akuntansi berfokus pada aliran masuk aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan dan konsep yang kedua berfokus pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya pada produsen lain atau konsumen. Sehingga pendapatan dapat diartikan sebagai aliran masuk aktiva bersih atau sebagai aliran ke luar barang atau jasa. Belkaoui (1993) menggambarkan konsep tersebut dengan skema di bawah ini :

Gambar 6
Konsep Pendapatan



Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Menurut (*Finacial Accounting Standart Board*) FASB dalam SFAC (*Statement of Financial Accounting Concept*) No.6, pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibanya (atau kombinasi

keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Menurut *Accounting Principle Board* (APB) statement no. 4 pendapatan dapat diartikan sebagai kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik.

Disimpulkan bahwa pendapatan merupakan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban sebagai hasil dari penyaluran barang atau jasa sehingga berpengaruh terhadap ekuitas pemilik yang berasal dari operasional utama perusahaan dan bukan dari penanaman modal yang dapat diakui dan diukur secara andal.

C. Pendapatan (*Revenue*) dan Keuntungan (*Gains*)

Pendapatan dalam suatu perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi pendapatan operasi dan pendapatan non operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan, pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh selain dari aktivitas utama perusahaan.

Kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat melalui berbagai transaksi. Namun, tidak semua transaksi mencerminkan timbulnya pendapatan. Kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari:

1. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham atau pemegang obligasi.
2. Keuntungan dari penjualan aktiva (bukan produk perusahaan) seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, penjualan anak atau cabang perusahaan.
3. Hadiah, sumbangan, atau penemuan.
4. Revaluasi aktiva.
5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk atau penyerahan jasa

Berdasarkan kelima transaksi yang dapat menaikkan nilai aktiva tersebut yang dapat diakui sebagai pendapatan dalam arti yang luas adalah poin ke-2 dan poin ke-5. Namun dalam arti sempit yang dapat dikatakan pendapatan hanya poin ke-5 saja, yaitu yang berasal dari penyerahan produk perusahaan. Meskipun, keuntungan mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk seperti aktiva tetap, surat-surat

berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan (poin ke-2).

Keuntungan mempunyai ciri khas yang melekat padanya, antara lain:

1. Kenaikan ekuitas (asset bersih)
2. Transaksi periferal atau insidental
3. Selain yang berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik.

Poin ke-2 merupakan karakteristik yang paling menonjol dari keuntungan, karena poin pertama dan ketiga sesungguhnya juga ada pada karakteristik pendapatan.

FASB mendefinisikan untung (*gains*) sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidental atau peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi pemilik. Berdasarkan definisi FASB mengenai pendapatan dan untung dapat dibedakan bahwa pendapatan berasal dari operasional utama perusahaan sedangkan keuntungan berasal dari aktifitas sampingan atau non operasional. Hal yang sama disampaikan IAI dalam PSAK No 23 yang juga membedakan antara pendapatan dengan keuntungan, bahwa penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*).

D. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan merupakan pencatatan jumlah nominal mata uang ke dalam sistem akuntansi sehingga nominal tersebut terrefleksi dalam laporan keuangan. Pendapatan hanya dapat diakui apabila dapat memenuhi aspek terukur (*measurability*) dan andal (*reliability*) berdasarkan kriteria pengakuan pendapatan.

Kapan pendapatan diakui merupakan waktu yang penting bagi proses akuntansi, karena kesalahan dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan dapat mempengaruhi kewajaran dan kebenaran dari laba yang dihasilkan. Pendapatan dapat terbentuk melekat pada seluruh aktivitas perusahaan mulai dari proses perencanaan, produksi, penyaluran barang atau penyerahan jasa, penagihan piutang dan sebagainya. Namun tidak mungkin pendapatan diakui dalam semua proses tersebut, maka butuh *critical event* atau kejadian penting yang paling menentukan yaitu pada saat kegiatan utama ekonomi (penciptaan barang dan jasa) dapat terselesaikan.

Pendapatan dapat diakui apabila kriteria pengakuan pendapatan dapat dipenuhi,. Menurut FASB dalam SFAC No.5 kriteria pengakuan pendapatan antara lain:

1. Telah terealisasi (*realized*), yaitu apabila telah terjadi transaksi pertukaran barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan kas, klaim untuk menerima kas, dan mempunyai kepastian segera terealisasi. Maksudnya adalah barang atau jasa yang telah diserahkan segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim untuk menerima kas.
2. Telah terbentuk (*earned*), yaitu apabila kegiatan memproduksi barang atau jasa sudah berjalan dan secara substansi telah selesai.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mengakui pendapatan apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan dapat mengalir ke perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Dengan kata lain pendapatan dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang pada konsumen
2. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual
3. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal

4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut
 5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara andal
- Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 menjelaskan kapan suatu pendapatan dapat diakui, antara lain:
1. Pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada saat tanggal penjualan, biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada pelanggan.
 2. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan dapat dibuat fakturnya.
 3. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain, seperti pendapatan bunga, dan royalty diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat menggunakan aktiva yang bersangkutan.
 4. Pendapatan dari penjualan aktiva diluar barang dagangan seperti penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui pada saat tanggal penjualan.

Secara umum pendapatan dapat diakui pada saat :

1. Proses produksi. Pengakuan pendapatan menggunakan prosedur prosentase penyelesaian, banyak dijumpai pada perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek dalam jangka waktu lama sampai beberapa periode akuntansi. Pengakuan pendapatan dengan cara ini dapat dilakukan apabila sudah terdapat kepastian nilai kontrak dan taksiran biaya untuk menyelesaikan kontrak. Nilai pendapatan ditaksir dengan mengakumulasikan biaya yang terjadi selama penyelesaian pekerjaan. Taksiran dapat dilakukan berdasarkan prosentase biaya (biaya dibandingkan dengan biaya total) atau prosentase penyelesaian fisik (tahap kemajuan proyek).
2. Selesai Produksi. Dapat dilakukan untuk produk yang harganya sudah pasti dan pemasaran yang terjamin. Syarat untuk dapat mengakui pendapatan selesai produksi antara lain: harga jual dapat ditentukan, biaya pemasaran tidak material, biaya produk sulit ditentukan, barang tidak terpengaruh perubahan bentuk dan ukuran. Biasa digunakan untuk industri tambang dan pertanian. Bidang konstruksi jangka panjang menyebutnya sebagai pengakuan metode kontrak selesai.

3. Penjualan. Pengakuan pada saat ini dianggap sebagai yang paling objektif dan jelas. IAI dalam PSAK no 23 memberikan ketentuan pengakuan pendapatan pada saat penjualan, antara lain:
- a. perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
 - b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
 - c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
 - d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut.
 - e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Namun metode pengakuan pada saat penjualan ini mempunyai masalah apabila ada biaya yang timbul setelah penjualan, pembeli mempunyai hak mengembalikan barang, potongan tunai, dan timbulnya kerugian piutang.

4. Pengakuan pendapatan diakui pada saat kas diterima. Penerapan dasar penerimaan kas paling banyak

dijumpai dalam perusahaan yang melakukan penjualan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Alasan dilakukan pengakuan pendapatan dengan metode ini adalah :

- a. Seluruh atau sebagian piutang bukanlah aktiva yang berdaya beli murni (dapat dibelanjakan).
- b. Semakin lama waktu angsuran semakin besar kemungkinan piutang tidak tertagih
- c. Biaya purna penjualan seperti biaya penagihan dan pengumpulan piutang biasanya lebih tinggi

Berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan pedoman umum dalam pengakuan pendapatan:

1. Kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat barang dan jasa diserahkan kepada konsumen.
2. Apabila kontrak penjualan atau penerimaan kas (atau keduanya) mendahului proses produksi dan pengiriman, maka pendapatan dapat diakui pada saat barang telah selesai diproduksi dan barang tersebut telah dikirim kepada pelanggan. Sebagai contoh: perusahaan A menerima pesanan pembelian sepatu sebanyak 100 unit senilai Rp 10 juta, dengan menerima uang muka (*Down Payment/DP*) sebesar Rp

2 juta. Dalam hal ini, perusahaan A belum bisa mencatat DP tersebut sebagai pendapatan karena belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan yakni terbentuk (belum dilakukan proses pembuatan sepatu). Perusahaan dapat mengakui uang muka tersebut jika perusahaan telah memproduksi sepatu.

3. Apabila proses produksi dilakukan lebih dari satu periode akuntansi seperti dalam perusahaan konstruksi, maka pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metoda persentase penyelesaian pada saat pendapatan tersebut telah terbentuk dengan syarat nilai pendapatan dari penyelesaian produksi/ pembangunan proyek dapat ditaksir/ditentukan dengan layak (cukup andal).
4. Apabila jasa yang diberikan memiliki nilai kontrak yang pasti dan berlangsung secara terus menerus dalam suatu periode akuntansi, maka pendapatan dapat diakui seiring dengan berjalannya waktu penggunaan jasa atau hak penggunaan aset tertentu. Sebagai contoh: perusahaan A menyewakan gedung kepada perusahaan B senilai Rp 500 juta selama 2 tahun sejak 1 Juli 2017. Dalam hal ini, perusahaan A mengakui pendapatan pada akhir periode akuntansi (31

Desember 2017) seiring dengan berlalunya waktu penggunaan gedung tersebut yaitu 1 Juli -31 Desember 2017 (6 bulan). Dengan demikian, nilai pendapatan sewa yang dicatat dalam laporan laba rugi adalah sebesar Rp 125 juta ($6/24 \text{ bulan} \times \text{Rp } 500 \text{ juta}$), dan bukan sebesar Rp 500 juta.

5. Apabila produk perusahaan dapat segera terealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa tambahan biaya yang berarti, maka pendapatan dapat diakui pada saat selesainya proses produksi. Pengakuan pendapatan ini dapat diterapkan salah satunya untuk produk pertanian tertentu.
6. Untuk bidang usaha tertentu yang nilai pendapatannya tidak dapat ditentukan secara pasti karena adanya kemungkinan pembayaran yang tidak tertagih, maka pendapatan dapat diakui pada saat kas telah terkumpul, bukan saat penyerahan barang atau jasa.

Hendrikson (1992) membuat tabulasi pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 15
Pengakuan Pendapatan

Saat Pengakuan Pendapatan	Kriteria	Contoh
pada saat proses produksi	Penetapan harga perusahaan berdasarkan kontrak atau persyaratan usaha yang umum ataupun harga pasar yang ada pada berbagai tingkat produksi	Akrual; kontrak jangka panjang; pertumbuhan (<i>accretion</i>)
pada saat selesainya produksi.	Adanya harga jual yang dapat ditentukan atau harga pasar yang stabil. Biaya pemasaran tidak besar	Logam mulia; produk pertanian; jasa
pada saat penjualan	Harga yang ditetapkan untuk produk tersebut; metode yang layak untuk menaksir jumlah yang dapat ditagih; penaksiran semua biaya material yang berkaitan	Mayoritas penjualan barang dagangan
pada saat kas	Tidak mungkin menilai	Penjualan

diterima	aktiva yang diterima dengan tingkat ketepatan yang wajar; biaya tambahan material mungkin masih ada dan biaya ini tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang wajar pada saat penjualan	angsuran; pertukaran aktiva tetap tanpa nilai yang ditetapkan secara teruji
----------	--	---

E. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur berdasarkan nilai tukar produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam transaksi yang wajar. IAI mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar yang diterima atau akan dapat diterima. Potongan tunai, retur penjualan, diskon usaha, rabat volume dan pengurang harga jual lainnya diperlakukan sebagai pengurang pendapatan.

F. Penyajian Pendapatan

Dalam menyajikan pos pendapatan dalam laporan keuangan khususnya laporan laba rugi, pendapatan harus dipisahkan antara pendapatan dan keuntungan (gains) serta keuntungan harus dipisahkan menjadi pos biasa dan luar biasa.

G. Pengungkapan Pendapatan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa.
2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari:
 - a. Penjualan barang.
 - b. Penjualan jasa.
 - c. Bunga.
 - d. Dividen.
 - e. Royalti.
3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan

H. Pendapatan Berdasarkan IFRS

International Accounting Standard (IAS) 18 merupakan kriteria pengakuan pendapatan dari IFRS. kriteria tersebut dibedakan antara penjualan barang atau penyediaan jasa, karena sifat barang dan jasa sangat berbeda.

1. Kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang menurut IAS 18 paragraf 14 adalah:
 - a. Pengalihan risiko signifikan dan kepemilikan barang dari perusahaan ke konsumen
 - b. Tidak ada keterlibatan managerial terhadap kepemilikan barang yang dijual
 - c. Jumlah pendapatan diukur dengan andal
 - d. Kemungkinan ada aliran manfaat ekonomis ke perusahaan yang berkaitan dengan transaksi
 - e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara andal
2. Kriteria pengakuan pendapatan dalam penyediaan jasa menurut IAS 18 paragraf 20 dan 26 adalah :
 - a. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
 - b. Kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir pada perusahaan
 - c. Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal
 - d. Biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara andal
 - e. Jika *outcome* transaksi penyediaan jasa tidak dapat diukur dengan andal maka pendapatan

hanya diakui sejauh biaya yang diakui akan ditutup
(*recoverable*)

3. Pengakuan Pendapatan saat produksi menurut IAS 41 dan IAS 18 adalah :

- a. Perusahaan mengakui pendapatan pada saat panen (produk pertanian)

Pendapatan diakui pada saat penjualan dengan metode *forward contract* (produk mineral), yaitu penyerahan barang di masa depan dengan harga jual tetap (*fixed*)

BAB IX

BIAYA (*EXPENSES*)

A. Pengertian Biaya

Biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk pemakaian aktiva, arus keluar, timbulnya hutang yang berasal dari penjualan, produksi barang atau penyerahan jasa atau kegiatan utama lainnya untuk mendapatkan pendapatan dalam perusahaan yang menyebabkan penurunan ekuitas tanpa pembagian pada pemilik saham. IAI mendefinisikan biaya sebagai berikut:

Beban (*expenses*) penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

SFAC no 6, FASB mendefinisikan biaya sebagai aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu perusahaan.

Sementara itu, APB mendefinisikan biaya sebagai penurunan *gross* dalam asset atau kenaikan *gross* dalam

keewajiban yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima yang berasal dari kegiatan mencari laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas terdapat karakteristik penting yang melekat pada arti biaya yaitu:

1. Aliran keluar atau penurunan asset
2. Akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menerus
3. Kenaikan kewajiban
4. Penurunan ekuitas

B. Biaya (*expenses*) dan Rugi (*loses*)

Kerugian merupakan defisit penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi atau pengeluaran kos tanpa adanya pengembalian (*return*) bagi perusahaan. Empat sumber rugi yang diidentifikasi FASB adalah (SFAC No. 6, prg. 85) antara lain:

- a. Periferal dan incidental: misalnya penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan asset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo.
- b. Transfer non timbal-balik (*non reciprocal transfers*) dengan pihak lain: misalnya pencurian

dan pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum.

- c. Penahanan aset (*holding assets*); misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai – tukar valuta asing, dan penurunan harga karena penahananediaan (*holding losses*)
- d. Factor lingkungan: misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari kos asset yang rusak. Contoh lain adalah lenyapnya manfaat asset yang tidak diasuransi akibat kebakaran.

Bedasarkan penjelasan di atas karakter penting yang membedakan antara biaya dan rugi adalah biaya merupakan kegiatan yang bersifat utama dan terus menerus dilakukan oleh perusahaan, namun kerugian timbul karena kegiatan yang bersifat incidental. Pengeluaran biaya dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan pendapatan, namun rugi terjadi tanpa ada timbal balik atau *return* bagi perusahaan.

C. Pengakuan Biaya

Pengakuan biaya menyakut masalah kriteria pengakuan (*recognition criteria*) dan saat pengakuan (*recognition rules atau timing*). Kriteria Pengakuan biaya atau rugi pada umumnya diakui

apabila salah satu dari dua kriteria berikut dipenuhi (SFAC No. 5, prg. 85):

- a. Konsumsi manfaat (*consumption of benefits*). Biaya atau rugi diakui bilamana manfaat ekonomik yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang merepresentasi operasi utama atau sentral entitas tersebut.
- b. Lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang (*loss or lack of future benefits*). Biaya atau rugi diakui bilamana asset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknyan atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik.

Biaya dapat diakui pada saat terjadinya atau diakui bersamaan dengan pengakuan pendapatan yang berkaitan. SFAC No. 5 paragraf. 86 memberikan ilustrasi mengenai saat dilakukan pengakuan biaya yaitu pada saat dilakukannya konsumsi manfaat.

- a. Beberapa pos biaya, seperti kos barang terjual, dibandingkan (*matched with*) dengan pendapatan yang terkait. Biaya diakui pada saat atau periode yang sama dengan pengakuan pendapatan yang

dihasilkan langsung atau bersama (*directly or jointly*) dari transaksi atau kejadian lain yang sama dengan yang menimbulkan biaya.

- b. Banyak pos biaya, seperti gaji staf penjualan dan administratif, diakui selama periode pada saat kas dibayarkan atau kewajiban terjadi untuk barang dan jasa yang dimanfaatkan/ dikonsumsi bersamaan dengan pemerolehan atau segera setelah itu.
- c. Beberapa pos biaya, seperti depresiasi dan asuransi, dialokasi (diakui) dengan prosedur sistematis dan rasional untuk periode-periode yang menikmati manfaat asset bersangkutan.

Selain saat dilakukannya konsumsi manfaat biaya juga dapat diakui ketika telah menjadi nyata atau jelas bahwa manfaat ekonomis masa datang suatu asset yang diakui sebelumnya telah berkurang atau lenyap atau bahwa kewajiban timbul atau bertambah tanpa adanya manfaat.

APB dalam statement No 4 paragraf 157-160 mengakui biaya dengan prinsip pervasif atau luas (*pervasive expense recognition principles*) yaitu :

- a. Mengasosiasi sebab dan akibat (*associating cause and effect*). Beberapa kos diakui sebagai biaya

atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu.

- b. Alokasi sistematis dan rasional (*systematic and rational allocation*). Bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasi sebab dan akibat, beberapa kos diasosiasikan dengan periode sebagai biaya atas dasar usaha (*attempt*) untuk mengalokasikan kos secara sistematis dan rasional ke beberapa periode yang diperkirakan menikmati manfaat.
- c. Pengakuan segera (*immediate recognition*). Beberapa kos diasosiasikan dengan periode berjalan sebagai biaya karena:
 - 1) Kos yang terjadi dalam periode berjalan tidak memberi manfaat masa datang yang cukup nyata (*discernible*),
 - 2) Kos yang dicatat sebagai aset dalam periode-periode sebelumnya tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis yang cukup nyata,
 - 3) Mengalokasikan berbagai kos baik atas dasar asosiasi dengan pendapatan atau atas dasar periode akuntansi dipandang tidak mempunyai manfaat yang berarti.

D. Pengukuran Biaya

Pengukuran biaya dapat dilakukan dengan berdasarkan pada :

- a. Cost historis (*Historical Cost*), merupakan jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva.
- b. Cost pengganti (*Replacement Cost*) / Cost masukan terkini (*Current Input Cost*), merupakan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang untuk memperoleh aktiva sejenis dalam kondisi yang sama.
- c. Setara Kas (*Cash Equivalent*), merupakan rupiah kas yang dapat direalisasi dengan cara menjual aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal.

E. Konsep Penandingan (*Matching*)

Konsep penandingan adalah konsep yang digunakan untuk mencari hubungan yang tepat antara biaya dengan pendapatan. Terdapat tiga cara dalam proses melakukan penandingan, yaitu :

- a. **Hubungan Sebab Akibat (*association of causes and effects*)**

Timbulnya biaya merupakan sebuah upaya dalam rangka mendapatkan pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang paling masuk akal adalah sebab akibat. Meskipun basis ini sulit untuk dibuktikan secara menyakinkan bahwa biaya menyebabkan pendapatan. Walaupun demikian, hubungan sebab akibat mempunyai validitas karena pengamatan terhadap operasi perusahaan pada umumnya menunjukkan bahwa pendapatan tidak akan terjadi tanpa penyerahan barang atau jasa. Kos produksi yang wajar dan perlu harus dilekatkan pada unit produk dan baru diakui sebagai biaya pada saat produk tersebut terjual. Penandingan sebab-akibat semacam ini disebut penandingan langsung (*direct matching*) dan untuk perusahaan pemanufakturan disebut dengan penandingan produk (*product matching*). Namun muncul beberapa masalah dalam melakukan cara ini, yaitu :

1) Identifikasi Kos Produk

Kos produk dibagi menjadi dua komponen yaitu kos produk yang telah terjual dan kos produk yang belum terjual dan masih menjadi

aset perusahaan. Kos yang melekat pada produk terjual akan langsung dibebankan sebagai biaya. Kos produk yang belum terjual atau persediaan baru dibebankan sebagai biaya kalau produk tersebut telah terjual. Masalah teknik yang timbul adalah tidak semua kos potensi jasa dapat dengan mudah dikaitkan dengan unit produk. Demikian juga, tidak semua unsur kos produksi dapat secara langsung dikaitkan dengan unit fisis produk maka penting untuk melakukan identifikasi kos produk langsung (*direct product cost*) atau kos produk tidak langsung (*indirect product cost*). *Cost* produk rusak yang bersifat normal dan sering terjadi diperlakukan sebagai biaya, namun kerusakan yang bersifat tidak biasa dan tidak rutin diperlakukan sebagai kerugian.

2) Biaya yang Berhubungan dengan Pendapatan Masa Datang, namun Tidak Masuk dalam Cost Produksi

Pada beberapa kasus *cost* masa yang akan datang tidak dapat dihubungkan langsung dengan produk. Contohnya adalah *cost* pendirian perusahaan, *cost* ii tidak dapat

dihubungkan dengan produk karena pada saat cost ini dikeluarkan perusahaan belum menghasilkan produk, maka cost ini akan diakui di masa mendatang dengan dikapitalisasi, sehingga biasanya diakui sebagai aktiva tidak berwujud. Namun apabila tidak ada hubungan antara pendapatan dan biaya maka proses penandingan tidak dapat dilakukan, sehingga menagguhkan pembebanan cost akan menyebabkan perataan laba dan tidak akan memberikan informasi lebih bagi pemakai laporan keuangan. Ilustrasi lainnya seperti cost penelitian dan pengembangan yang dapat memberikan manfaat masa mendatang, namun sangat sulit untuk melakukan penandingan, maka FASB menyarankan untuk mengakui secara langsung biaya tersebut pada periode berjalan.

3) Biaya yang Terjadi Setelah Pendapatan Diakui

Contoh dari biaya yang timbul setelah pendapatan diakui adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan purna jual (*after sale costs*) seperti garansi penjualan, jaminan

reparasi gratis, dan pengumpulan piutang. Apabila biaya tersebut dapat ditaksir dengan layak dan cukup pasti maka *cost* tersebut harus diakui sebagai biaya pada saat pendapatan diakui, contohnya biaya garansi. Akan tetapi jika biaya garansi tersebut melebihi biaya yang sudah ditaksir maka akan diakui sebagai kerugian. Contoh lainnya adalah timbulnya biaya tambahan atas pengiriman barang, jika dapat ditaksir maka pendapatan diakui dengan cara harga jual dikurangi taksiran biaya yang muncul akibat pengiriman barang tersebut.

Pada kontrak jangka panjang dengan menggunakan metode pengakuan pendapatan setelah kontrak selesai, maka *cost* yang terjadi diakui sebagai aktiva dan total akumulasi *cost* tersebut diakui sebagai biaya ketika adanya pengakuan pendapatan pada saat proyek selesai dan diserahkan. Pada penggunaan metode prosentase penyelesaian *cost* yang dikeluarkan diakui sebagai biaya untuk menghasilkan pendapatan

b. Alokasi Sistematis dan Rasional (*systematic and rational allocation*)

Disebut juga sebagai metode penandingan tidak langsung (*indirect matching*) atau penandingan periodic (*period matching*). Dasar penandingan ini digunakan apabila penandingan sebab akibat tidak dapat digunakan. Penandingan ini menggunakan periode sebagai ukurannya bukan unit produk secara fisik. Oleh karena itu biaya diakui sebagai penanding pendapatan pada periode terjadinya. Apabila aktiva lebih dari satu periode maka cost dialokasikan secara sistematis pada periode dimana manfaat tersebut dinikmati, contohnya adalah ddepresiasi aktiva tetap.

Alasan digunakannya alokasi sistematis dan rasional, *pertama*, banyak cost yang mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan pendapatan pada periode berjalan, contohnya biaya sewa dihubungkan dengan penjualan selama masa sewa.. *Kedua*, ada beberapa cost yang sulit dihubungkan langsung dengan pendapatan, contohnya biaya pengobatan karyawan. *Ketiga*, manfaat masa mendatang yang tidak dapat diukur secara pasti atau cost yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan manfaat masa datang maka pembebanan cost harus segera diakui sebagai

biaya, contohnya biaya rekreasi karyawan. *Keempat*, biaya regular dan berulang diakui sebagai biaya, meskipun penandingan tidak terjadi secara tepat, contohnya biaya riset. *Kelima*, biaya berupa *joint cost* seperti contohnya biaya pajak bumi dan bangunan menggunakan alokasi arbitrer pada kegiatan yang berbeda.

c. Pembebanan Segera (*immediate recognition*)

Apabila kedua pembebanan berdasarkan sebab akibat atau alokasi sistematis dan rasional tidak dapat digunakan maka dengan alasan kepraktisan cost dapat dibebankan secara langsung, contohnya adalah biaya iklan. Bisa jadi orang membeli suatu produk dengan melihat iklan beberapa tahun yang lalu, maka manfaat dari iklan tersebut tidak dapat diukur secara tepat dalam periode berjalan. Contoh lainnya adalah biaya penelitian dan pengembangan, menurut FASB No.2 meskipun manfaat akan dapat dirasakan pada masa mendatang namun biaya atas penelitian dan pengembangan tidak dapat dikapitalisasi dan dicatat sebagai aktiva namun harus segera diakui pada periode terjadinya.

F. Penyajian Biaya

Penyajian biaya berhubungan dengan penyajian pendapatan. Biaya dan pendapatan disajikan dalam laporan laba-rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi sangat bergantung pada konsep tentang pembentuk laba.

BAB X

LABA (*INCOME*)

A. Pengertian Laba

Laba dianggap sebagai elemen penting yang dapat merefleksikan kinerja perusahaan sehingga menjadi perhatian para pemakai laporan keuangan. Laba merupakan hasil residual antara pendapatan dikurangkan dengan semua biaya. Hasil residual ini berupa kerugian apabila biaya melebihi pendapatan yang diperoleh. Laba juga dapat diartikan sebagai hasil imbalan kerja perusahaan atas usahanya dalam menghasilkan barang dan jasa. IAI mendefinisikan *income* sebagai penghasilan yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal, penghasilan ini meliputi pendapatan dan juga keuntungan.

Laba merupakan informasi penting dalam suatu laporan keuangan, yang digunakan untuk :

1. Perhitungan pajak sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima Negara;
2. Menghitung deviden yang akan dibagikan;

3. Menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan;
4. Peramalan laba maupun kondisi perusahaan di masa akan datang;
5. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi;
6. Menilai prestasi atau kinerja perusahaan;
7. Perhitungan zakat;
8. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran;
9. Sebagai dasar penentuan kompensasi dan pembagian bonus.

B. Konsep Laba Ekonomi dan Laba Akuntansi

Laba dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari sisi ekonomi dan sisi akuntansi.

1. Konsep Laba Ekonomi (*Economic Income*)

a. Pengertian Laba Ekonomi

Laba secara ekonomi merupakan peningkatan kekayaan. Laba juga dapat diartikan sebagai dari sisi ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor dari hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi seluruh biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut.

b. Sifat Laba Ekonomi

1) *Physical Income*

Konsumsi barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Laba jenis ini sulit untuk diukur, namun dapat diperkirakan dengan menggunakan *real income*.

2) *Real Income*

Kepuasan terjadi karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang atau jasa. Ukuran yang digunakan adalah biaya hidup (*cost of living*)

3) *Money Income*

Hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

c. Konsep Mempertahankan Kemakmuran (*Capital Maintenance*)

Konsep ini menyatakan bahwa laba muncul setelah modal yang dikeluarkan masih ada atau biaya telah tertutupi atau setelah terjadi pengembalian modal. Konsep ini dinyatakan dalam ukuran uang yang disebut *Financial Capital* atau dalam ukuran tenaga

beli yang disebut *Physical Capital*. Kedua ukuran tersebut menghasilkan empat konsep yaitu :

1) Dalam ukuran uang (*Financial Capital*)

a) *Money Maintenance*

Laba diukur menurut unit modal keuangan yang diinvestasikan. Laba menurut konsep ini merupakan perubahan *net asset* dengan menyesuaikan transaksi modal yang dijabarkan dalam satuan uang.

b) *General Purchasing Power Money Maintenance*

Laba diukur dengan jumlah unit daya beli yang sama. Laba menurut konsep ini adalah perubahan *net asset* setelah disesuaikan transaksi modal yang diukur dengan tenaga beli yang sama.

2) Dalam ukuran tenaga beli umum (*Physical Capital*)

a) *Productive Capacity Maintenance*

Modal fisik diukur dalam jumlah unit uang. Kapasitas produksi diartikan sebagai kapasitas fisik dan kapasitas untuk memproduksi. Sama dengan konsep *Current Value Accounting*. *Current Value* dapat

dihitung dengan menggunakan 5 metode yaitu :

(1) *Capitalization* atau *Present Value Method*

Merupakan jumlah bersih dari arus kas (kas masuk-kas keluar) yang diharapkan diterima dan didiskontokan pada saat ini. Informasi yang diperlukan untuk mengukur dengan metode ini adalah arus kas, jangka waktu arus kas, sisa umur aktiva, dan *discount rate*

(2) *Current Entry Price*

Jumlah kas yang dibutuhkan untuk mendapatkan aktiva yang sama atau sejenis. Dibedakan menjadi pertama, *replacement cost used*, yaitu jumlah kas yang diperlukan untuk mendapat asset yang serupa yang memiliki umur pemakaian yang sama di pasar barang bekas. Kedua, *reproduction cost* merupakan jumlah kas yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva yang sama sekarang

(3) Current Exit Price

Jumlah kas yang diterima apabila asset tersebut dijual dalam keadaan normal

b) General Purchasing Power, Productive Capacity Maintenance

Diukur dengan unit tenaga beli yang sama. Kapasitas produksi fisik perusahaan yang diukur dalam unit tenaga beli yang sama, dipertahankan, dan dipelihara.

d. Contoh Kasus

Kasus di bawah ini merupakan contoh dari empat konsep *capital maintenance*.

PT Jaya Abadi memiliki kekayaan bersih sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 1 Januari 2017 dan pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp150.000.000,00. Untuk mempertahankan kapasitas produksi fisik perusahaan yang sebenarnya, diperlukan biaya Rp120.500.000,00, sedangkan tingkat harga umum naik 10% selama periode itu. Hitunglah laba menurut keempat konsep *capital maintenance*

1) Money Maintenance

Net Asset 31 Desember 2017	Rp 150.000.000,00
Net Asset 1 Januari 2017	<u>Rp 100.000.000,00</u> -
Laba	Rp 50.000.000,00

2) GPP Money Maintenance

Net Asset 31 Desember 2017	Rp 150.000.000,00
Net Asset 1 Januari 2017	Rp 100.000.000,00
Penyesuaian GPL=	
10% x Rp100.000.000,00	<u>Rp 10.000.000,00(+)</u>
	<u>Rp 110.000.000,00 (-)</u>
Laba	Rp 40.000.000,00

3) Productive Capacity Maintenance

Net Asset 31 Desember 2017	Rp 150.000.000,00
Biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi perusahaan	<u>Rp 120.500.000,00 (-)</u>
Laba	Rp 29.500.000,00

4) GPP Productive Capacity Maintenance

Net Asset 31 Desember 2017	Rp 150.000.000,00
Biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi perusahaan:	
Net Asset 1 Januari 2000	Rp 120.500.000,00
Penyesuaian GPL =	
10% x Rp 120.500.000,00	<u>Rp 12.050.000,00 (+)</u>

Rp 132.550.000,00 (-)

Laba

Rp 17.450.000,00

2. Konsep Laba Akuntansi (*Accounting Income*)

a. Pengertian Laba Akuntansi

Laba dari sisi akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dan biaya produksi. Dapat diartikan pula sebagai perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut.

b. Sifat Laba Akuntansi

laba akuntansi memiliki lima karakteristik antara lain:

- 1) Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa.
- 2) Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.
- 3) Laba akuntansi didasarkan prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.

- 4) Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya (*expenses*) dalam bentuk biaya historis.
- 5) Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (*matching*) antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

c. Keunggulan Laba Akuntansi

- 1) Laba akuntansi bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual, yang didukung bukti objektif.
- 3) Laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme, dalam arti akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi.
- 4) Laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama pertanggungjawaban manajemen.

d. Kelemahan Laba Akuntansi

- 1) Laba akuntansi gagal mengakui kenaikan aktiva yang belum direalisasi dalam satu

periode karena prinsip *cost histories* dan prinsip realisasi.

- 2) Laba akuntansi yang didasarkan pada *cost histories* mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan *cost* dan metode alokasi.
- 3) Laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, *cost histories*, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan.
- 4) Konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas dalam akuntansi. akuntansi dinilai :
 - a) Belum mampu memberikan ukuran terbaik untuk menentukan nilai arus jasa dan perubahan nilainya.
 - b) Belum sepakat mana yang masuk dan tidak masuk perhitungan laba.
 - c) Ketidaksepakatan antara berbagai pihak siapa yang menjadi pemakai informasi *net income* ini.
- 5) Standar akuntansi yang diterima umum masih mengandung berbagai cara yang berbeda-beda dan mengandung ketidakkonsistenan

baik antar perusahaan maupun dalam suatu periode tertentu.

- 6) Perubahan tingkat harga telah mengubah arti laba yang diukur berdasarkan nilai historis sehingga perubahan nilai uang atau tingkat inflasi belum diperhitungkan untuk keputusan jangka pendek.
- 7) Kurang bermanfaat untuk keputusan jangka pendek.
- 8) Informasi lainnya di luar data historis dinilai lebih bermanfaat bagi investor dalam pengambilan keputusan.
- 9) Kurangnya informasi fisik dan perilaku yang membuat informasi laba semakin meningkat.

e. Permasalahan Laba Akuntansi

Permasalahan yang sering dihadapi mengenai laba akuntansi adalah menentukan nilai ekonomi, harga, modal, skala, dan pengukuran pertukaran. Nilai ekonomi adalah preferensi seseorang terhadap suatu produk berdasarkan kegunaan di masa yang akan datang dibanding dengan produk lainnya. Apabila terjadi pertukaran, maka akan terjadi pertukaran harga (*exchange price*) yang ditetapkan

berdasarkan nilai uang. Jenis harga dalam menentukan laba akuntansi yaitu :

- 1) Harga Historis (*Historical Cost*)
- 2) Harga Sekarang (*Current Price*)/ Harga Ganti (*Replacement Cost*)/ *Exit Price*
- 3) Harga nanti, harga ganti nanti, atau harga *exit price* nanti.
- 4) Harga Diskonto/ *Computed Amount*

f. Konsep Laba Akuntansi

Pada laba akuntansi dikenal konsep *Replacement Cost Income* dengan dua komponen laba yaitu :

- 1) *Current oprating profit* : Perhitungan dari pengurangan biaya pengganti (*replacement cost*) dari penghasilan
- 2) *Realized holding gain and loss* : Perhitungan perbedaan antara *replacement cost* barang yang dijual dengan biaya historis barang yang sama.

3. Perbandingan antara Laba Akuntansi dan Laba Ekonomi

Laba akuntansi berbeda dengan laba ekonomi karena perbedaan konsep dasar yang dianut. Laba akuntansi dilandasi oleh konsep kontinuitas usaha yang memandang aset sebagai sisa potensi jasa

sehingga kos historis menjadi basis pengukurannya. Sedangkan laba ekonomi dilandasi oleh konsep likuidasi yang melihat aset sebagai simpanan atau persediaan nilai setiap saat sehingga nilai sekarang menjadi basis pengukurannya.

Tabel 16
Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Ekonomi

Aspek Pembeda	Laba Akuntansi	Laba Ekonomi
Sudut pandang pemaknaan	Perekayasaan akuntansi, Penyusun standar, dan Penyusun statemen Keuangan	Pemegang saham
Dasar Pengukuran	Biaya historis	Biaya kesempatan dan Nilai pasar
Pengertian “Ekonomik”	Kelayakan jangka panjang	Penilaian jangka pendek
Makna Depresiasi	Alokasi biaya	Penurunan nilai ekonomis
Unit Pengukur	Nominal Rupiah	Daya beli
Konsep Dasar yang Melandasi	Kontinuitas usaha (asas akrual)	Likuidasi atau Nilai tunai

BAB XI

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (*DISCLOSURE*)

A. Definisi Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian (*release*) informasi. Sedangkan secara sempit yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan. Pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan dilakukan untuk melindungi hak pemegang saham

Tiga konsep pengungkapan laporan keuangan yaitu:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*)

Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Tujuannya untuk memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi yaitu sesuai standar akuntansi yang berlaku.

2. Pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*)

Merupakan upaya dalam memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Pengungkapan ini menyajikan informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna

Laporan Keuangan yang potensial. Informasi minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang wajar.

3. Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*)

Merupakan pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara suka rela.

Pengungkapan yang memadai akan berdampak positif bagi para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Namun perlu dipertimbangkan manfaatnya harus lebih besar dibandingkan dengan biayanya.

Pengungkapan Laporan Keuangan di Indonesia diatur dalam PSAK. Namun bagi perusahaan publik, selain mengacu pada PSAK juga harus memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai regulator pasar modal.

B. Jenis-Jenis Pengungkapan Laporan Keuangan

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.

C. Metode Pengungkapan Laporan Keuangan

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat laporan keuangan beserta informasi lainnya. Metode pengungkapan laporan keuangan antara lain:

1. Pos Laporan Keuangan

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui Laporan keuangan dalam bentuk pos atau elemen laporan keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian (jenis laporan, format laporan, klasifikasi pos, dan susunan pos). Jenis laporan meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan aliran kas. PSAK No 1 Pasal 39 dan 44, misalnya menetapkan pengungkapan pos-pos neraca sebagai berikut:

39 Perusahaan menyajikan aktiva lancar terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban jangka pendek

terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam SAK khusus. Aktiva lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo.

44 suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, dan (b) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

2. Catatan Kaki

Catatan kaki (*footnotes*) atau catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statements*) merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan. Catatan atas laporan keuangan menjadi bagian integral dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dan berkaitan dengan pos.

3. Penjelasan Dalam Kurung

Merupakan penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos. Contohnya Utang obligasi

(Rp50.000 jatuh tempo 1 Maret 2005).....Rp500.000

4. Istilah Teknis

Istilah teknis dan strategik harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul, atau subjudul.

5. Lampiran

Penggunaan lampiran dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen (internal). Rincian, laporan tambahan, daftar rincian (*schedule*), atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan laporan utama.

6. Komunikasi Manajemen

Manajemen dapat menyampaikan informasi kualitatif atau nonfinansial yang dirasa penting untuk diketahui pemakai laporan melalui berbagai cara. Wawancara manajer dengan wartawan (jumpa pers). Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham (*letter to shareholders*), laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan diskusi analisis manajemen (DAM)

7. Catatan Dalam Laporan Auditor

Pengungkapan yang bermanfaat dapat pula dilakukan oleh pihak lain yaitu auditor independen. Laporan keuangan merupakan asersi dan representasi manajemen sehingga pengungkapan adalah kewajiban manajemen bukan auditor. Auditor hanya meyakinkan bahwa pengungkapan sudah cukup berdasarkan standar pelaporan.

Pengungkapan auditor biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menghalangi auditor untuk menerbitkan laporan auditor bentuk standar (sering disebut pendapat wajar tanpa syarat antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan akuntansi dan konsistensi.
- b. Keraguan tentang kelangsungan perusahaan.
- c. Persetujuan atas penyimpangan dari PABU.
- d. Penekanan suatu hal dalam statemen atau kejadian.
- e. Pengaitan nama auditor dengan statemen keuangan tidak auditan.
- f. Statemen keuangan komparatif yang salah satu diaudit auditor lain.
- g. Pembatasan lingkup audit dan independensi auditor.

Daftar Pustaka

- Belkaoui, A.R. 1993. *Accounting Theory*. 3rd ed. Orlando: Harcourt Brace Jovanovich
- _____. 2010. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghazali, Imam. Chariri, Anis. 2014. *Teori Akuntansi International Financial Reporting System (IFRS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendriksen, E.S., 1992. *Accounting Theory*. 5th ed. Homewood Illinois: Ricard D.Irwin
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Standar Akuntansi Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- Soemarso, S.R. 2003. *Akuntansi Suatu Pengantar (Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Wahyuni, Ersya Tri. 2018. *Overview PSAK Konvergensi IFRS Terbaru*. Disampaikan pada Seminar Nasional di Semarang pada tanggal 3 Juli 2018
- www.iaiglobal.or.id

BIODATA PENULIS

Dita Andraeny, SE, M.Si dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada 28 Juni 1988. Menempuh pendidikan sarjana dan pascasarjana di Universitas Jenderal Soedirman dalam bidang akuntansi. Saat ini penulis aktif sebagai dosen Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta.

Devi Narulitasari, SE.Sy., M.Si. lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 17 Juli 1989. Gelar S1 dalam bidang Akuntansi Syariah diperoleh dari IAIN Surakarta pada tahun 2011 dan gelar S2 dalam bidang Akuntansi diperoleh dari program pascasarjana UNS tahun 2016. Saat ini aktif sebagai dosen di IAIN Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah.

Usnan SEI., M.Si. lahir di Kuningan pada tanggal 19 September 1985. Menyelesaikan pendidikan S1 Prodi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dan S2 Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah pada kampus yang sama pada tahun 2012. Saat ini pengajar pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

Praktik akuntansi terus berkembang seiring dengan semakin beragamnya transaksi bisnis diberbagai sektor usaha. Dalam konteks ini, mahasiswa akuntansi harus memahami konsep-konsep yang mendasari praktik akuntansi tersebut sehingga mereka memiliki bekal ilmu ketika kelak ingin bekerja sebagai penyusun laporan keuangan perusahaan, auditor, akademisi, wirausaha, dan sebagainya.

Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa akuntansi untuk mempelajari mata kuliah teori akuntansi dengan baik karena teori akuntansi berisi pembahasan terkait konsep, prinsip, dan kaidah yang mendasari praktik akuntansi saat ini serta perkembangan standar akuntansi yang diterapkan.

Buku ini disusun dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa akuntansi untuk lebih memahami teori akuntansi.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia
<http://www.iain-surakarta.ac.id>

ISBN: 978-602-6248-18-3

